SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja khususnya kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja perlu membentuk persetujuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan;

b. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja secara sirkuler telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*);

c. bahwa. . .

c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai dasar hukum bagi pemberlakuan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN

DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) yang secara sirkuler telah ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 Oktober 2017.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lydia Silvanna Djaman

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

UNTUK

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja,

berhasrat untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan serta bermaksud untuk mengadakan kesepakatan untuk penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan,

telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak.

PASAL 2

PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau pemerintah-pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta bergerak atau tidak bergerak.
3. Pajak-pajak yang berlaku dalam Persetujuan ini adalah:

   a) dalam hal Indonesia:

      pajak penghasilan

      (selanjutnya disebut "pajak Indonesia");

   b) dalam hal Kamboja:

      (i) Pajak atas Laba termasuk Pajak yang Dipotong atau Dipungut, Pajak Minimum, Pajak atas Laba Tambahan dalam Pembagian Dividen dan Pajak atas Keuntungan dari Pengalihan Harta;

      (ii) Pajak atas Gaji

Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah pengenaan Pajak Minimum

(selanjutnya disebut dengan "pajak Kamboja")

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan saling memberitahukan setiap perubahan substansial yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan negara mereka.

PASAL 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Untuk kepentingan dari Persetujuan ini, kecuali jika dalam hubungan kalimatnya harus diartikan lain:

(a) (i) istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya, dan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, hak-hak kedaulatan atau jurisdiksi berdasarkan hukum internasional;

(ii) istilah "Kamboja" berarti wilayah Kerajaan Kamboja, dan semua wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah bawah sampai batas terluar laut territorial dan ruang udara yang dikuasai Kerajaan Kamboja, sesuai dengan hukum internasional, hak kedaulatan jurisdiksi;

(b) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya berarti Indonesia atau Kamboja, sesuai dengan hubungan kalimatnya ;

(c) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang-orang dan/atau badan-badan;

(d) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;

(e) istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak" dan "perusahaan dari Negara Pihak lainnya", masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk suatu Negara Pihak dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya;

(f) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan antara tempat- tempat di Negara Pihak lainnya;

(g) istilah "warga negara" berarti:

(i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan atau kependudukan pada suatu Negara Pihak; dan

(ii) setiap badan hukum, kemitraan, atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Pihak;

(h) istilah "pejabat yang berwenang" berarti:

(i) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

(ii) dalam hal Kamboja, Menteri Ekonomi dan Keuangan atau wakilnya yang sah.

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara Pihak, setiap istilah yang tidak dijelaskan dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Persetujuan ini, setiap pengertian menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara itu melampaui pengertian yang diberikan menurut perundang-undangan lainnya di Negara tersebut untuk istilah tersebut.

PASAL 4

PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak" berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat pendirian usahanya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa dan juga termasuk Negara tersebut dan pemerintah daerahnya. Meskipun demikian, istilah ini tidak termasuk orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.

2. Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

   (a) ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);

   (b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokok tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia biasanya menetap;

   (c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan ;

   (d) jika ia memiliki kewarganegaraan di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama .

3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1 orang atau badan selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara Pihak, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama.

PASAL 5

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dijalankan.

2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :

   (a) suatu tempat kedudukan manajemen;

   (b) suatu cabang;

   (c) suatu kantor;

   (d) suatu pabrik;

   (e) suatu bengkel;

   (f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;

   (g) suatu lahan pertanian atau perkebunan; dan

   (h) suatu tambang, sumber minyak atau gas, tempat penggalian, atau tempat lain yang digunakan untuk ekstrasi atau eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber daya alam termasuk kayu atau hasil hutan, instalasi, bangunan, alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi dari sumber-sumber daya alam.

3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi :

   (a) suatu bangunan, proyek konstruksi, proyek perakitan, atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang terkait dengan proyek-proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung lebih dari 183 hari;

   (b) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang ditugaskan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung terus-menerus (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di

Negara Pihak dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan.

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya pada Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi:

   (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata untuk tujuan penyimpanan atau pameran barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
   (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata untuk tujuan penyimpanan atau pameran;
   (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata untuk tujuan pengolahan oleh perusahaan lain;
   (d) pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi perusahaan;
   (e) pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi perusahaan;
   (f) pengurusan tempat usaha tetap dengan maksud semata-mata menjalankan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai (e),

   sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal sub-ayat (f), kegiatan secara keseluruhan dari tempat usaha tetap tersebut bersifat persiapan atau penunjang.

5. Ayat 4 tidak berlaku terhadap tempat usaha tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjalankan usaha pada tempat yang sama atau tempat lainnya yang berada di Negara Pihak yang sama dan

(a) tempat tersebut atau tempat lainnya merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, atau

(b) kegiatan secara keseluruhan dari gabungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dua perusahaan pada tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di dua tempat, bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang,

sepanjang kegiatan kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh dua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan usaha.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan--selain agen yang bertindak bebas yang terhadapnya berlaku ayat 7--bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya, perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara pihak yang disebutkan pertama atas kegiatan yang dilakukan orang atau badan tersebut untuk perusahaan, jika orang atau badan tersebut:

(a) memiliki dan biasa menjalankan di Negara tersebut sebuah wewenang untuk membentuk kontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan-kegiatan orang atau badan tersebut terbatas pada kegiatan-kegiatan yang diatur dalam ayat 4 yang, jika dijalankan melalui tempat usaha tetap, tidak akan menjadikan tempat usaha tetap ini bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut; atau

(b) tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, tetapi biasa memelihara di Negara yang disebutkan pertama persediaan barang-barang atau barang dagangan dari tempat dia biasanya mengantar barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan; atau

(c) tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, tetapi biasa menerima pesanan di Negara yang disebutkan pertama seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan itu sendiri atau untuk perusahaan dan

perusahaan-perusahaan lainnya yang dikuasai olehnya atau pihak pemegang kendali pada perusahaan tersebut; atau

(d) membuat atau memproses barang yang dimiliki perusahaan dari Negara yang disebutkan pertama.

7. (a) Perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, apabila orang atau badan bertindak secara seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama satu perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa termasuk hubungan dagang dan keuangan, maka orang atau badan tersebut tidak akan dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut.

(b) Dalam kaitannya dengan Pasal ini, orang atau badan memiliki hubungan istimewa dengan suatu perusahaan apabila, berdasarkan fakta dan kondisi yang relevan, salah satu pihak memiliki kendali atas pihak lainnya atau keduanya berada di bawah kendali orang atau badan atau perusahaan yang sama. Dalam hal apapun, orang atau badan dianggap memiliki hubungan istimewa dengan suatu perusahaan apabila orang atau badan tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen hak pada perusahaan tersebut (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak pilih dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas dalam perseroan) atau apabila orang atau badan lain memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak pilih dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas dalam perseroan) pada badan dan perusahaan.

8. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, sebuah perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak, kecuali berkenaan dengan

reasuransi, dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya jika perusahaan tersebut mengumpulkan premi di wilayah Negara Pihak lainnya atau menjamin risiko yang terletak di sana melalui orang atau badan selain agen yang bertindak bebas yang terhadapnya berlaku ayat 7.

9. Fakta bahwa perseroan yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan yang merupakan penduduk dari Negara Pihak lainnya, atau yang menjalankan usaha di Negara lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap atau lainnya) tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari satu dan lainnya.

PASAL 6

PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk suatu Negara Pihak dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak di mana harta yang bersangkutan berada. Namun, dalam hubungannya dengan Persetujuan ini, istilah tersebut meliputi benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak, dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak atas mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai kepemilikan lahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak-hak atas pembayaran tetap atau tidak tetap sebagai imbalan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, bahan-bahan galian, sumber-sumber, dan sumber daya alam lainnya termasuk kayu dan produk hasil hutan lainnya; kapal dan pesawat tidak dianggap harta tidak bergerak.

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 juga berlaku terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, dari pemilikan atau dari penggunaan harta tidak bergerak dalam bentuk apapun.

4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

PASAL 7

LABA USAHA

1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya, namun hanya atas bagian laba yang berasal dari:

   (a) bentuk usaha tetap tersebut;

   (b) penjualan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya itu atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau

   (c) kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara Pihak lainnya yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap.

2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut.

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang

dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya.

4. Sepanjang merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian seacara proporsional atas seluruh laba perusahaan terhadap bagian-bagiannya, maka ketentuan pada ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang akan dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti yang lazim digunakan, namun cara pembagian secara proporsional tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini.

5. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang.

6. Apabila didalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

PASAL 8

PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Laba yang bersumber dari suatu Negara Pihak yang timbul dari suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya dari pengoperasian kapal di perairan internasional, dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan di negara tersebut akan dikurangi sebesar 50 persen dari pajak yang seharusnya terutang.
3. Ketentuan ddalam ayat 1 dan 2 berlaku pula atas laba dari partisipasi dalam kumpulan, penggabungan usaha, atau agen pengoperasian internasional.

PASAL 9

PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila

   (a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya, atau

   (b) orang-orang atau badan-badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak, dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya,

   dan dalam kedua kasus manapun kondisi-kondisi yang berlaku dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan antara kedua perusahaan dimaksud berbeda dengan kondisi-kondisi yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diperoleh salah satu perusahaan, tetapi dikarenakan kondisi-kondisi tersebut menjadi tidak ada, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

2. Apabila suatu Negara Pihak melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu- dan dikenakan pajak- dan bagian yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebutkan pertama apabila kondisi-kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka Negara Pihak lainnya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba tersebut, terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain

dalam Persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi.

3. Ketentuan ayat 2 tidak berlaku apabila proses hukum peradilan, administratif atau lainnya telah menghasilkan keputusan akhir bahwa dengan tindakan menimbulkan penyesuaian laba berdasarkan ayat 1, salah satu perusahaan bersangkutan dikenakan denda sehubungan dengan penipuan, kelaiaian atau kesalahan yang disengaja.

PASAL 10

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lain tersebut .

2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut menjadi penduduk dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima manfaat yang menikmati dividen adalah penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari nilai bruto dividen. Ayat ini tidak akan mempengaruhi hak pemajakan atas suatu perusahaan terkait laba yang merupakan sumber pembayaran dividen.

3. Istilah dividen yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham, saham-saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, hak atas laba, dan demikian pula pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang diberikan perlakuan pemajakan yang sama dengan penghasilan atas saham berdasarkan perundangan-undangan Negara di mana perusahaan yang membagikan dividen tersebut menjadi penduduk.

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara Pihak, menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya dimana perseroan yang membayarkan dividen berkedudukan, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat tetap yang berada disana, dan pemilikan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada permasalahannya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 15.

5. Persetujuan ini tidak dibuat untuk mencegah suatu Negara Pihak dari mengenakan pajak atas pembagian laba suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan domestiknya. Namun demikian, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi tarif yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini.

6. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lain itu atau apabila penguasaan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara lain itu, ataupun mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara lain tersebut.

PASAL 11

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, namun jika pemilik yang menikmati manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada Pemerintah, atau Pemerintah daerahnya, Bank Sentral atau setiap lembaga Keuangan yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah dari Negara Pihak lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak di negara yang disebutkan pertama:

   (a) Dalam hal Indonesia:

      (i) Bank Indonesia;
      (ii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
      (iii) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
      (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
      (v) Badan hukum publik atau institusi lain yang disetujui dari waktu ke waktu antara pejabat-pejabat yang berwenang dari masing-masing Negara Pihak;

   (b) Dalam hal Kamboja:

      (i) Bank Sentral atau Pemerintah daerahnya;
      (ii) the Rural Development Bank;
      (iii) the National Social Security Fund; dan
      (iv) Badan hukum publik atau institusi lain yang disetujui dari waktu ke waktu antara pejabat-pejabat yang berwenang dari masing-masing Negara Pihak.

4. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada surat-surat berharga, obligasi, atau surat-surat utang tersebut. Denda atas pembayaran yang terlambat bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga berkedudukan di suatu Negara Pihak, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut atau b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15 akan berlaku.

6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar bunga penduduk Negara Pihak itu. Namun demikian, apabila orang yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu Negara Pihak atau tidak mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak di mana bunga dibayarkan dan bunga itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

7. Apabila karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan utang yang menghasilkan bunga tersebut, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati dari bunga

tersebut seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

PASAL 12

ROYALTI

1. Royalti yang timbul di suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Namun demikian, royalti tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak dimana royalti itu berasal sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak tersebut, akan tetapi apabila penerima manfaat yang sebenarnya dari royalti tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto royalti tersebut.
3. Istilah "royalti" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni ataupun karya ilmiah termasuk film-film sinematografi, atau film-film, atau pita-pita yang digunakan dalam siaran radio atau televisi, semua paten, merek dagang, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, untuk digunakan, atau hak untuk menggunakan peralatan industri, dagang, atau ilmiah, atau untuk penggunaan informasi mengenai industri, dagang, maupun ilmu pengetahuan.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku jika pihak penerima manfaat royalti yang sebenarnya, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya di mana royalti tersebut berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berlokasi di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang berlokasi di sana, dan hak atau harta berkenaan dengan royalti yang dibayarkan itu mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, sesuai dengan keadaannya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15 akan berlaku.

5. Royalti dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar royalti berkedudukan di Negara Pihak tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar royalti itu, tanpa memandang apakah ia berkedudukan di suatu Negara Pihak atau tidak, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di suatu Negara Pihak sehubungan dengan kewajiban pembayaran royalti itu telah dibuat, dan royalti itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, sehubungan dengan penggunaan, hak, atau informasi yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan di masing-masing Negara Pihak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

PASAL 13

IMBALAN ATAS JASA TEKNIS

1. Imbalan atas jasa teknis yang timbul di suatu Negara Pihak yang diperoleh oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Namun demikian, imbalan atas jasa teknis tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana penghasilan itu timbul, dan sesuai dengan ketentuan hukum di Negara tersebut, tetapi jika penerima adalah penerima manfaat sebenarnya atas imbalan jasa teknis tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah kotor imbalan atas jasa teknis tersebut.

3. Istilah "imbalan atas jasa teknis" berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sehubungan dengan pemberian jasa manajerial, teknis atau konsultasi, termasuk ketentuan oleh perusahaan jasa teknis atau orang lainnya, tetapi tidak termasuk pembayaran atas jasa yang terhadapnya diberlakukan Pasal 16 Persetujuan ini.

4. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku apabila penerima manfaat sesungguhnya dari imbalan atas jasa teknis, merupakan penduduk suatu Negara Pihak, menjalankan usaha di Negara Pihak di mana imbalan atas jasa teknis timbul melalui bentuk usaha tetap di negara tersebut, dan imbalan atas jasa teknis mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. Dalam hal demikian, sesuai dengan keadaannya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 akan berlaku.

5. Imbalan atas jasa teknis dianggap timbul di Negara Pihak di mana pembayar merupakan penduduk. Namun demikian, apabila orang yang membayar imbalan atas jasa teknis tersebut, baik merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak atau tidak, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di suatu Negara Pihak sehubungan dengan kewajiban

pembayaran imbalan atas jasa teknis itu telah dibuat, dan imbalan atas jasa teknis itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka imbalan atas jasa teknis itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar imbalan atas jasa teknis dengan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah imbalan atas jasa teknis yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima manfaat imbalan atas jasa teknis yang sebenarnya tersebut seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan di masing-masing Negara Pihak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

PASAL14

KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari Negara Pihak di Negara Pihak lainnya atau dari harta bergerak yang merupakan bagian dari tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak di Negara Pihak lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta bergerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat udara tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara di Negara Pihak tersebut.

4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan saham-saham perseroan yang lebih dari 50 persen dari nilai kekayaannya secara langsung atau tidak langsung berasal dari harta tidak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

5. Keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak di mana yang melakukan pemindahtanganan berkedudukan.

PASAL 15

PEKERJAAN BEBAS

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13, Penghasilan yang diperoleh individu yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dalam hal tersebut dibawah ini, di mana penghasilan itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya:

   (a) apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara Pihak lainnya itu; dalam hal demikian, penghasilan yang dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu hanyalah atas bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tetap tersebut; atau

   (b) apabila ia tinggal di Negara Pihak lainnya dalam satu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dalam hal demikian, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya itu yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli tehnik, arsitek, dokter gigi, dan akuntan.

PASAL 16

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17, 19, dan 20, gaji, upah, dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak terkait pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak dari pekerjaan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila:

   (a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan

   (b) imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan

   (c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara Pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

PASAL 17

IMBALAN DIREKTUR

1. Imbalan-imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk Negara Pihak dalam kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris maupun jabatan yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Gaji, upah dan imbalan lain yang serupa yang diperoleh penduduk Negara Pihak dalam kedudukannya sebagai pegawai yang berada pada posisi manajemen puncak suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

PASAL 18

ARTIS DAN ATLET

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15 dan 16, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak sebagai pekerja seni, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai atlet dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh pekerja seni atau atlet dalam kapasitasnya tersebut diterima bukan oleh pekerja seni atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 7, 15 dan 16, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak dimana kegiatan-kegiatan artis atau atlet itu dilakukan.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pada Pasal ini, penghasilan yang diperoleh berkaitan denganwarga kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada Pasal ini dalam kerangka pertukaran kebudayaan atau olahraga yang disetujui oleh kedua Negara Pihak akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak di mana kegiatan tersebut dilakukan.

PASAL 19

PENSIUN, PEMBAYARAN BERKALA, DAN JAMINAN SOSIAL

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 20 ayat 2, pensiun, pembayaran berkala, dan imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada seorang penduduk dari suatu Negara Pihak sehubungan dengan pekerjaan di masa lampau dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

2. Namun, pensiun atau imbalan sejenis lainnya tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya apabila pembayaran dilakukan oleh seorang penduduk dari Negara Pihak lainnya atau suatu bentuk usaha tetap yang berlokasi di Negara Pihak lainnya tersebut.

   Istilah 'pembayaran berkala' berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu semasa hidup pembayar berkala atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai balas jasa yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, pensiun yang dibayarkan dan pembayaran lainnya yang dibuat berdasarkan program-program pemerintah yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dari suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

PASAL 20

JASA KEPEMERINTAHAN

1. (a) Gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa, yang dibayarkan oleh suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya kepada individu sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

   (b) Namun demikian, gaji, upah dan imbalan lain tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan individu yang memberikan jasa tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut yang:

   (i) merupakan warga negara dari Negara itu; atau

   (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata dengan tujuan untuk melakukan jasa-jasa tersebut.

2. (a) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1, pensiun dan imbalan lain yang serupa yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yang dibentuk oleh, suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

   (b) Namun demikian, pensiun dan imbalan lain yang serupa tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya apabila orang pribadi tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16, 17, 18, dan 19 berlaku terhadap gaji, upah, pensiun, dan imbalan lain yang serupa sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Negara Pihak atau pemerintah daerahnya atau badan publiknya.

PASAL 21

SISWA DAN PEMAGANG

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau peserta pelatihan atau pemagang yang sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara Pihak merupakan penduduk Negara Pihak lainnya dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihannya, untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut.
2. Sehubungan dengan hibah, beasiswa, dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang siswa atau pemagang yang disebutkan dalam ayat 1, sebagai tambahan selama masa pendidikan atau pelatihan tersebut berhak atas pengecualian-pengecualian, keringanan atau pengurangan pajak yang sama dengan yang diberikan kepada penduduk Negara Pihak yang ia kunjungi.

PASAL 22

GURU DAN PENELITI

1. Seseorang yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara Pihak merupakan seorang penduduk dari Negara Pihak lainnya dan yang, atas undangan universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa yang diakui oleh Negara Pihak, museum atau lembaga kebudayaan lainnya, berada di Negara Pihak tersebut untuk masa yang tidak melebihi 2 (dua) tahun berturut-turut semata-mata untuk tujuan mengajar, memberikan kuliah atau melakukan penelitian di lembaga dimaksud akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara Pihak tersebut atas imbalan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak berlaku terhadap penghasilan dari kegiatan penelitian apabila penelitian tersebut dilakukan untuk manfaat pribadi seseorang atau orang-orang atau badan-badan tertentu.

PASAL 23

PENGHASILAN LAINNYA

1. Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh penduduk Negara Pihak, dari manapun asalnya yang tidak disebut dalam Pasal-Pasal sebelumnya dalam Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku untuk penghasilan, selain penghasilan dari pemindahtanganan harta tidak bergerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2, apabila penerima penghasilan tersebut adalah penduduk suatu Negara Pihak, yang menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya itu melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta berkenaan dengan penghasilan yang dibayarkan itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, sesuai permasalahannya, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, bagian-bagian penghasilan penduduk suatu Negara Pihak yang tidak disebut dalam Pasal-Pasal sebelumnya dari Persetujuan ini dan berasal dari Negara Pihak lainnya, dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

PASAL 24

ELIMINASI PAJAK BERGANDA

1. Apabila penduduk suatu Negara pihak memperoleh penghasilan yang, sesuai dengan ketentuan persetujuan ini, dapat dikenakan Pajak di Negara pihak lainnya. Negara yang disebutkan pertama memperbolehkan pengurangan dalam jumlah yang sepadan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan di Negara Pihak lainnya dari pajak atas penghasilan penduduk tersebut di Negara yang disebutkan pertama. Namun demikian, jumlah pengurangan itu tidak diperkenankan melebihi jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum diberikannya pengurangan yang terkait tersebut sesuai dengan keadaannya terhadap penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya.
2. Untuk tujuan pengkreditan pajak di suatu Negara, pajak yang dibayar di Negara Pihak lainnya akan dianggap termasuk jumlah pajak yang terutang di Negara Pihak lainnya tetapi telah dibebaskan atau dikurangi sesuai dengan perundang-undangan terkait insentif dan peraturan yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Untuk kepentingan ayat 1 dari Pasal ini, istilah "pajak yang dibayar", dalam kasus Kamboja, tidak termasuk Pajak Laba Tambahan atas Pembagian Dividen terutang sehubungan dengan penghasilan yang ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini berlaku.

PASAL 25

NON-DISKRIMINASI

1. Warga negara dari suatu Negara Pihak tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang terkait dengan pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warga negara dari Negara Pihak lainnya dalam keadaan yang sama, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

2. Pengenaan pajak atas suatu bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan di suatu Negara Pihak di Negara Pihak lainnya tidak dapat dilakukan dengan kurang menguntungkan dibandingkan pajak yang dikenakan atas perusahaan di Negara Pihak lainnya yang melakukan kegiatan yang sama di Negara Pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak lainnya suatu potongan pribadi, keringan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.

3. Kecuali apabila ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7, Pasal 12 ayat 6, atau Pasal 13 ayat 6 berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak kepada penduduk Negara Pihak lainnya, untuk tujuan menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan tersebut, akan dapat dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama apabila pembayaran tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak yang disebutkan pertama.

4. Perusahaan dari suatu Negara Pihak, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang terkait dengan pengenaan pajak tersebut di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atau kewajiban-kewajiban terkait yang

dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara Pihak yang disebut pertama.

5. Tidak ada yang terkandung dalam paragraf-paragraf sebelumnya dari pasal ini ditafsirkan sebagai mempengaruhi setiap ketentuan hukum masing-masing Negara Pihak mengenai konsesi pajak yang telah diberikan.

6. Yang dimaksud dengan istilah "perpajakan" dalam Pasal ini adalah pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.

PASAL 26

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang- undangan nasional masing-masing Negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak di mana ia menjadi penduduk Negara itu atau, apabila kasusnya berkenaan dengan Pasal 24 ayat 1, kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak di mana ia menjadi warga negaranya.

2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup berasalan dan apabila atas masalah tersebut tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap Persetujuan yang telah disepakati akan diterapkan terlepas dari batas waktu yang ada dalam perundang-undangan nasional di kedua Negara Pihak.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu Persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.

4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya.

PASAL 27

PERTUKARAN INFORMASI

1. Para pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum dalam perundang-undangan domestik Negara Pihak atau pemerintah daerahnya tersebut, sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan Pasal 2.

2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara Pihak harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya boleh diungkapkan kepada orang-orang atau pihak-pihak berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan, penegakan hukum atau penuntutan, dalam memutuskan keberatan yang terkait dengan pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau pengawasan tersebut di atas. Orang-orang atau pihak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan. Menyimpang dari sebelumnya, informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak dapat digunakan untuk tujuan lain apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain yang berada di bawah perundang-undangan kedua Negara dan pejabat yang berwenang dari Negara yang memberikan informasi memberikan izin atas penggunaan tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk membebani suatu Negara Pihak dengan kewajiban:

(a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau Negara Pihak lainnya;

(b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya;

(c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan, atau rahasia keahlian atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijakan publik (ketertiban umum).

4. Apabila informasi yang diminta oleh Negara Pihak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Negara Pihak lainnya harus menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara Pihak lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum ini harus memperhatikan pembatasan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena Negara Pihak tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.

5. Terhadap kondisi apapun ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan informasi karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, *nominee* atau orang yang bertindak sebagai agen atau kapasitas fidusier atau karena informasi yang diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan.

PASAL 28

ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota misi diplomatik atau konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

PASAL 29

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang terakhir saat masing-masing Negara pihak saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, penyelesaian prosedur yang diperlukan oleh hukum atau undang-undang untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku:

(a) di Indonesia:

(i) sehubungan dengan pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan

(ii) sehubungan dengan pajak penghasilan lainnya, tahun pajak dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini; dan

(b) di Kamboja:

(i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari setelah tahun kalender di mana Persetujuan ini berlaku dan pada tahun-tahun kalender berikutnya; dan

(ii) sehubungan dengan pajak Kamboja lainnya, yang diperoleh pada tanggal 1 Januari atau setelah tanggal 1 Januari setelah tahun kalender di mana Persetujuan ini berlaku dan pada tahun-tahun kalender berikutnya.

PASAL 30

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Persetujuan pada atau sebelum 30 Juni suatu tahun kalender setelah masa 5 (lima) tahun sejak berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan tidak akan berlaku lagi:

(a) di Indonesia:

(i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalendar berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan

(ii) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalendar berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan

(b) di Kamboja:

(i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalendar berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan

(ii) sehubungan dengan pajak Kamboja lainnya, yang diperoleh pada tanggal 1 Januari atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalendar berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal 23 Okt 2017 dan di Phnom Penh pada tanggal 13 Okt 2017 dalam bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris, dimana ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA
Dr. SRI MULYANI INDRAWATI	**Dr. AUN PORNMONIROTH**
Menteri Keuangan	**Menteri Senior**
	Menteri Ekonomi dan Keuangan

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters and intending to conclude an agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on wages or salaries.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

   (a) in Indonesia:

      the income tax.

      (hereinafter referred to as "Indonesian tax");

   (b) in Cambodia:

      (i). Tax on Profit including Withholding Tax, Minimum Tax, Additional Profit Tax on Dividend Distribution and Capital Gains Tax;

      (ii). Tax on Salary;

      Nothing in this Agreement shall prevent the application of the Minimum Tax

      (hereinafter referred to as "Cambodian tax");

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in this Article. The competent authorities of the Contracting States

shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

   (a) (i) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;

   (ii) the term "Cambodia" means the territory of the Kingdom of Cambodia, as well as those maritime areas, including the seabed and subsoil adjacent to the outer limits of the territorial sea and airspace over which the Kingdom of Cambodia exercises, in accordance with international law, sovereign rights of jurisdiction;

   (b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Indonesia or Cambodia as the context requires;

   (c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

   (d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

   (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

   (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

   (g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership, or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Indonesia, the Minister of Finance or any representative authorised by the Minister;

(ii) in the case of Cambodia, the Minister of Economy and Finance or any representative authorised by the Minister.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management, principal place of business or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

   (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

   (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shali be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

   (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

   (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall resolve the question by mutual agreement.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise of a contracting State is wholly or partly carried on in the other Contracting State.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

   (a) a place of management;
   (b) a branch;
   (c) an office;
   (d) a factory;
   (e) a workshop;
   (f) a warehouse or premises used as sales outlet;
   (g) a farm or plantation; and
   (h) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction or exploration or exploitation of natural resources including timber or forest produce, an installation, structure, drilling rig or working ship used for exploration or exploitation of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also encompasses:

   (a) a building site, a construction, assembly or installation projector supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than 183 days;
   (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any 12–month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supply of information, which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph (f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

(a) Has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

(b) Has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) Has no such authority, but habitually secures orders in the first-mentioned State wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it; or

(d) Manufactures or processes goods belonging to the enterprise in the first-mentioned State.

7. (a) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related including commercial and financial relations, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

(b) For the purpose of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

8. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other Contracting State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. However, for the purpose of this Agreement, the term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock, and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property, and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources, and other natural resources including timber and other forest produce; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

   (a) that permanent establishment;

   (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

   (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purpose of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees, or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for

management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State from the operation in international traffic of ships may be taxed in the first mentioned State, but the tax imposed in that State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

ARTICLE 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

   (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

   (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

   and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State –and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where judicial, administrative or other legal proceedings have resulted in a final ruling that by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the enterprises concerned is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or willful default.

ARTICLE 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting State from imposing tax on the disposal of profits of a permanent establishment out of that Contracting State in accordance with the provisions of its domestic law. However, the tax so imposed shall not exceed the rate specified in paragraph 2 of this Article.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any

tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profit consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government, or a local authority, the Central Bank or any financial institution wholly owned by the Government of the other Contracting State shall be exempt in the first-mentioned State:

   (a) in the case of Indonesia:

      (i) Bank Indonesia (the Central Bank of Indonesia);
      (ii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (the Indonesia Eximbank);
      (iii) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (the Indonesia Social Security Agency for Health);
      (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (the Indonesia Social Security Agency for Manpower); and
      (v) a statutory body or any institution as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

   (b) in the case of Cambodia:

      (i) the Central Bank or any local authority;
      (ii) the Rural Development Bank;
      (iii) the National Social Security Fund; and
      (iv) a statutory body or any institution as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a

right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as any other amounts treated as income from money lent by the laws, relating to tax, of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or fixed base or with (b) business activities referred to under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or fixed base, or with (b) business activities referred to in (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed

to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right, or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been be agreed upon between the payer and beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services, including the provision by the enterprise of the services of technical or other personnel, but does not include payments for services to which Article 16 of this Agreement applies.

4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, and the fees for technical services are effectively connected with (a) such permanent establishment, or with (b) business activities referred to in (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall only apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 13, income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

   (a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

   (b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.

ARTICLE 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, and 20, salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

   (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month; and

   (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

   (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

ARTICLE 17

DIRECTORS' FEES

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15, and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of cultural or sports exchange program agreed upon by both Contracting States shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 19

PENSIONS, ANNUITIES, AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions, annuities, and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in that State.

2. However, such pensions, annuities, and other similar remuneration may also be taxed in the other Contracting State if the payment is made by a resident of that other State or a permanent establishment situated therein.

   The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life of the annuitant or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

ARTICLE 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority or statutory body shall be taxable only in that State.

   (b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

   (i) is a national of that State; or

   (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority or statutory body shall be taxable only in that State.

   (b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17, 18 and 19 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority or a statutory body thereof.

ARTICLE 21

STUDENTS AND TRAINEES

1. Payments which a student, business apprentice, or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education, or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. In respect of grants, scholarships, and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice or trainee described in paragraph 1 shall in addition be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs, or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

ARTICLE 22

TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution which is recognised by the government, museum or other cultural institution in that other State, is present in that other State for a period not exceeding two consecutive years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such activity.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken by the individual primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 23

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in that other State.

2. For the purposes of allowance as credit in a Contracting State, the tax paid in the other Contracting State shall be deemed to include the amount of tax which is otherwise payable in that other Contracting State but has been exempted or reduced in accordance with incentive laws and connected regulations designed to promote economic development in that other State.

3. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term "tax paid", in the case of Cambodia, does not include Additional Profit Tax on Dividend Distribution payable in respect of income to which the provisions of paragraph 2 of this Article applies.

ARTICLE 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, paragraph 6 of Article 13 apply, interest, royalties, technical fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned, or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing contained in the preceding paragraphs of this article shall be construed as affecting any provisions of the laws of the respective Contracting States regarding any tax concessions granted.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

   (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

   (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION AND CONSULAR POST

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

ENTRY INTO FORCE

This agreement shall enter into force on the latter of the dates on which the respective Contracting States notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by its law or legislation for bringing into force this Agreement. This agreement shall have effect:

(a) in Indonesia:

(i) in respect of taxes withheld at the source to income derived on or after 1 January in the year next following the year in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in the year next following the year in which the Agreement enters into force; and

(b) In Cambodia:

(i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount as derived on or after the first day of January following the calendar year in which the Agreement enters into force and in subsequent calendar years; and

(ii) in respect of other Cambodian taxes, in relation to income arising on or after the first day of January following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years.

ARTICLE 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before 30th of June of any calendar year following after the period of five years from the date the Agreement enters into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Indonesia:

(i) in respect of taxes withheld at the source to income derived on or after 1 January in the year next following the year in which the notice of termination is given; and

(ii) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in the year next following the year in which the notice of termination is given; and

(b) in Cambodia:

(i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount as derived on or after the first day of January following the calendar year in which the notice of termination is given; and

(ii) in respect of other Cambodian taxes, in relation to income arising on or after the first day of January following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Jakarta on 23rd Oct 2017 and at Phnom Penh on 13th Oct 2017 in the Indonesian, Khmer, and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Indonesia	For the Royal Government of Cambodia
[signature]	[signature]
Dr. SRI MULYANI INDRAWATI	**Dr. AUN PORNMONIROTH**
Minister of Finance	**Senior Minister**
	Minister of Economy and Finance

REPUBLIK INDONESIA

កិច្ចព្រមព្រៀង

រវាង

រដ្ឋាភិបាល

នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

និង

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្តីពីការចៀសវាង

ការយកពន្ធត្រួតគ្នា និង

ការបង្ការការកឹបកេងបន្លំពន្ធ

ពាក់ព័ន្ធនឹង

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

មាត្រា ១
វិសាលភាពលើបុគ្គល

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋមួយ ឬរដ្ឋទាំងពីរដែលជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។

ក្នុងគោលបំណងបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកពន្ធដារ និង ឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់លុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមព្រៀង ដូចតទៅ÷

មាត្រា ២
វិសាលភាពនៃពន្ធ

១- កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះបណ្តាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលកំណត់ដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋនោះ ដោយមិនផ្តោតលើវិធាននៃការកំណត់ពន្ធទាំងនោះ។

២- ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសំដៅដល់បណ្តាពន្ធដែលត្រូវបានកំណត់លើចំណូលសរុប ឬចំណែកនៃចំណូល រួមបញ្ចូលទាំងបណ្តាពន្ធលើចំណេញដែលសម្រេចបានមកពីការលក់ ឬផ្ទេរចលនឬអចលនទ្រព្យ និងបណ្តាពន្ធលើប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់បៀវត្ស។

៣- កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះបណ្តាប្រភេទពន្ធ ដូចខាងក្រោម÷

ក. សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី÷

(i) ពន្ធលើចំណូល

(តទៅនេះហៅកាត់ថា "ពន្ធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី")

ខ. សម្រាប់កម្ពុជា÷

(i) ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធកាត់ទុក ពន្ធអប្បបរមា ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបន្ថែមលើការបែងចែកភាគលាភ និងពន្ធលើចំណេញមូលធន

(ii) ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

គ្មានបញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចរារាំងដល់ការអនុវត្តពន្ធអប្បបរមា

(តទៅនេះហៅកាត់ថា "ពន្ធរបស់កម្ពុជា")។

៤- កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះប្រភេទពន្ធណាដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធ ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយបន្ថែម ឬជំនួសឱ្យប្រភេទពន្ធជាធរមាន ដូចមានចែងក្នុងមាត្រានេះ។ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ ត្រូវជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនូវរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មសំខាន់ៗ លើច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធរបស់ខ្លួន។

មាត្រា ៣
និយមន័យទូទៅ

១- សម្រាប់គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ វៀរលែងតែមានបរិបទដែលតម្រូវឱ្យមានអត្ថន័យផ្សេង÷

ក. (i) ពាក្យ "ឥណ្ឌូនេស៊ី" រាប់បញ្ចូលដែនដីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់របស់ខ្លួន និងតំបន់នៅជាប់គ្នាដែលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព ឬយុត្តាធិការ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។

(ii) ពាក្យ "កម្ពុជា" សំដៅដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងតំបន់សមុទ្រ ដែលរួមមាន ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ និងស្រទាប់ដីក្រោមបាតសមុទ្រ ដែលជាប់នឹងដែនសមុទ្រខាងក្រៅ និងដែនអាកាស ហើយដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព ឬយុត្តាធិការ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។

ខ. ពាក្យ "រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង" និង "រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត" សំដៅដល់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ឬព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមតម្រូវការនៃបរិបទ។

គ. ពាក្យ "បុគ្គល" រួមបញ្ចូលរូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលដទៃទៀត។

ឃ. ពាក្យ "ក្រុមហ៊ុន" សំដៅដល់នីតិបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជានីតិបុគ្គល សម្រាប់គោលដៅពន្ធ។

ង. ពាក្យ "សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង" និង "សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត" សំដៅដល់សហគ្រាសដែលប្រកបអាជីវកម្មដោយនិវាសនជនរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង និងសហគ្រាសដែលប្រកបអាជីវកម្មដោយនិវាសជនរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។

ច. ពាក្យ "ចរាចរណ៍អន្តរជាតិ" សំដៅដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវា ឬយន្តហោះ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង លើកលែងតែក្នុងករណីនាវា ឬយន្តហោះធ្វើ ប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ។

ឆ. ពាក្យ "ជនជាតិ" នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង សំដៅដល់÷

(i) រូបវន្តបុគ្គលទាំងឡាយដែលជាពលរដ្ឋ ឬមានសញ្ជាតិរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ និង

(ii) នីតិបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ឬសមាគមទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង អនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ។

ជ. ពាក្យ "អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច" សំដៅដល់÷

(i) ក្នុងករណីឥណ្ឌូនេស៊ី÷ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ឬតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។

(ii) ក្នុងករណីកម្ពុជា÷ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

២- សម្រាប់គោលដៅនៃមាត្រា១០ មាត្រា១១ និងមាត្រា១២ បរធនបាលដែលជាប់ពន្ធក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងចំពោះភាគលាភ ការប្រាក់ ឬសួយសារ ត្រូវចាត់ទុកជាម្ចាស់ទទួលផលកម្រៃនៃភាគលាភ ការប្រាក់ ឬសួយសារទាំងនោះ។

៣- ចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ក្នុងពេលដែលពាក្យណាមួយមិនបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពាក្យនោះត្រូវមានន័យដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋនោះ សម្រាប់គោលដៅយកពន្ធដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ វៀរលែងតែមានបរិបទតម្រូវឱ្យមានអត្ថន័យផ្សេង។ និយមន័យនៃពាក្យណាមួយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋនោះ ត្រូវមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើនិយមន័យដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដទៃទៀតរបស់រដ្ឋនោះ។

មាត្រា ៤
និវាសនជន

១- សម្រាប់គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពាក្យ "និវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង" សំដៅដល់បុគ្គលណាមួយ ដែលជាប់ពន្ធនៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋនោះ ដោយសារមានលំនៅដ្ឋាន និវាសនដ្ឋាន ទីកន្លែងចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រង ទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាគោលដើម ឬលក្ខណវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត ដែលមានភាពប្រហាក់ប្រហែល ដោយរួមបញ្ចូលផងដែរទាំងរដ្ឋនោះ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋនោះ។

២- យោងតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ ក្នុងករណីដែលបុគ្គលម្នាក់ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ ស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនោះ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម÷

ក. បុគ្គលនោះត្រូវបានចាត់ទុកជានិវាសនជនរបស់រដ្ឋម្ខាងប៉ុណ្ណោះ ដែលបុគ្គលនោះមានលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋនោះ។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរ បុគ្គលនោះត្រូវចាត់ទុកជានិវាសនជនតែក្នុងរដ្ឋមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន និងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាង (មូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍សំខាន់)។

ខ. ប្រសិនបើពុំអាចកំណត់រដ្ឋដែលបុគ្គលនេះមានមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗបាន ឬបុគ្គលនោះគ្មានលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋណាមួយ បុគ្គលនោះត្រូវចាត់ទុកជានិវាសនជនតែក្នុងរដ្ឋម្ខាងដែលបុគ្គលនោះមានកន្លែងស្នាក់នៅជាទម្លាប់។

គ. ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមាន ឬគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅជាទម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរ បុគ្គលនោះត្រូវចាត់ទុកជានិវាសនជនតែក្នុងរដ្ឋម្ខាង ដែលបុគ្គលនោះមានសញ្ជាតិ។

ឃ. ក្នុងករណីដទៃទៀត អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមក។

៣- យោងតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ ក្នុងករណីបុគ្គលដែលមិនមែនជារូបវន្តបុគ្គល ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមក

មាត្រា ៥
គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍

១- សម្រាប់គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពាក្យ "គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍" សំដៅដល់ទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ ដែលសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មទាំងស្រុង ឬផ្នែកណាមួយនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។

២- ពាក្យ "គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍" មានជាអាទិ៍÷

ក. ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រង

ខ. សាខារបស់សហគ្រាសបរទេស

គ. ការិយាល័យ

ឃ. រោងចក្រ

ង. រោងជាង

ច. ឃ្លាំង ឬបរិវេណដែលប្រើប្រាស់ជាកន្លែងលក់

ឆ. កសិដ្ឋាន ឬកន្លែងដាំដុះ និង

ជ. ទីតាំងរុករករ៉ែ អណ្តូងប្រេងកាត ឬឧស្ម័នធម្មជាតិ ទីតាំងវាយយកថ្ម ឬទីតាំងយក ឬស្វែងរុករក ឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិ ដែលរួមបញ្ចូលផលិតផលពីឈើ ឬព្រៃឈើ ការបង្កុំ រចនាសម្ព័ន្ធ គ្រឿងចក្រសម្រាប់ខួងអណ្តូងប្រេងកាត នាវាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រើសម្រាប់ស្វែងរុករក ឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិ។

៣- ពាក្យ "គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍" ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរ÷

ក. ការដ្ឋានសំណង់អគារ គម្រោងសាងសង់ឬគម្រោងបង្គុំឬដំឡើង ឬសកម្មភាពតាមដានពិនិត្យ ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងទីតាំងឬគម្រោងទាំងនោះ ក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាការដ្ឋាន ឬគម្រោង ឬសកម្មភាពទាំងនោះ មានរយៈពេលលើសពី ១៨៣ថ្ងៃ។

ខ. ការផ្តល់សេវា ដែលរួមមានទាំងសេវាប្រឹក្សាដែលធ្វើឡើងដោយសហគ្រាសតាមរយៈនិយោជិត ឬបុគ្គលិកផ្សេងទៀតជួលដោយសហគ្រាសនោះ ក្នុងគោលដៅខាងលើ លុះត្រាតែសកម្មភាពទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ (សម្រាប់គម្រោងដូចគ្នា

ឬពាក់ព័ន្ធគ្នា) នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង មួយលើក ឬច្រើនលើក ដែលមានរយៈពេលសរុបលើសពី ១៨៣ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេល ១២ខែ ណាមួយ ។

គ. សកម្មភាពអាជីវកម្ម (រួមបញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ធុនធ្ងន់) នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតសម្រាប់ការស្វែងរុករក ឬការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិ សម្រាប់មួយលើក ឬច្រើនលើក ដែលមានរយៈពេលសរុបលើសពី ៩០ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេល ១២ខែ ណាមួយ។

៤ ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិខាងលើនៃមាត្រានេះក៏ដោយ ពាក្យ"គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍" មិនត្រូវបានចាត់ទុកថារាប់បញ្ចូល÷

ក. ការប្រើប្រាស់នូវទីតាំងសម្រាប់តែគោលដៅក្នុងការស្តុកទុក ឬការតាំងបង្ហាញទំនិញ ឬផលិតផល ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស

ខ. ការថែទាំទំនិញក្នុងស្តុក ឬផលិតផល ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស សម្រាប់តែគោលដៅក្នុងការស្តុកទុក ឬការតាំងបង្ហាញ

គ. ការថែទាំទំនិញក្នុងស្តុក ឬផលិតផល ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស សម្រាប់តែគោលដៅក្នុងការកែច្នៃដោយសហគ្រាសដទៃទៀត

ឃ. ការរក្សាទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ សម្រាប់តែគោលដៅក្នុងការទិញទំនិញ ឬផលិតផល ឬការប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់សហគ្រាស

ង. ការរក្សាទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ សម្រាប់តែគោលដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលមានចរិតលក្ខណៈត្រៀមបម្រុងទុក ឬបន្ទាប់បន្សំ សម្រាប់សហគ្រាស

ច. ការរក្សាទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ សម្រាប់តែសកម្មភាពរួមផ្សំគ្នាណាមួយនៃសកម្មភាពដែលមានចែងក្នុងវាក្យខណ្ឌ (ក) ដល់ (ង)

ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសកម្មភាពនេះ ឬក្នុងករណីវាក្យខណ្ឌ (ច) ដែលជាសកម្មភាពរួមនៃទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ មានចរិតលក្ខណៈត្រៀមបម្រុងទុក ឬបន្ទាប់បន្សំ។

៥-	កថាខណ្ឌ៤ ពុំត្រូវអនុវត្តចំពោះទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ដែលប្រើប្រាស់ ឬរក្សាដោយ សហគ្រាស ក្នុងករណីដែលសហគ្រាសនោះ ឬសហគ្រាសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធប្រកបសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅទីតាំងដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នា នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយ និង

ក. ទីកន្លែងនោះ ឬទីកន្លែងផ្សេងទៀត បង្កើតជាគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់សហគ្រាស ឬសហគ្រាសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ដោយយោងតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះ ឬ

ខ. សកម្មភាពរួមដែលកើតចេញពីការផ្សំគ្នារវាងសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលធ្វើឡើងដោយសហគ្រាសពីរនៅកន្លែងតែមួយ ឬដោយសហគ្រាសនោះផ្ទាល់ ឬដោយសហគ្រាសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅទីកន្លែងពីរផ្សេងគ្នា ហើយដែលសកម្មភាពរួមនោះពុំមានចរិតលក្ខណៈត្រៀមបម្រុងទុក ឬបន្ទាប់បន្សំ

ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនោះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហគ្រាសពីរនៅកន្លែងតែមួយ ឬដោយសហគ្រាសនោះផ្ទាល់ ឬដោយសហគ្រាសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅទីកន្លែងពីរផ្សេងគ្នា បង្កើតជាមុខងារបំពេញបន្ថែម ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមានលក្ខណៈពេញលេញ។

៦-	ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិក្នុងកថាខណ្ឌ១ និង២ ក៏ដោយ បុគ្គល (ក្រៅពីភ្នាក់ងារមានលក្ខណៈឯករាជ្យដែលកថាខណ្ឌ៧ អនុវត្ត) បំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងក្នុងនាមសហគ្រាសមួយនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត សហគ្រាសនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងដែលបានលើកឡើងពីខាងដើម ចំពោះបណ្តាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងក្នុងនាមសហគ្រាស ក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះ÷

ក. មាន និងអនុវត្តសិទ្ធិជាប្រចាំលើការចុះកិច្ចសន្យាក្នុងនាមសហគ្រាសនៅក្នុងរដ្ឋនោះ វៀរលែងតែសកម្មភាពទាំងនោះ ត្រូវបានកំណត់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ៤ខាងលើ ទោះបីសកម្មភាពនោះធ្វើឡើងតាមរយៈទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់ក៏ដោយ ទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់នោះ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ៤ នោះឡើយ ឬ

ខ. ពុំមានសិទ្ធិក្នុងការចុះកិច្ចសន្យា ប៉ុន្តែ ថែរក្សាស្តុកទំនិញឬផលិតផលជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋខាងដើម ដែលតែងតែបញ្ជូនទំនិញ ឬផលិតផលក្នុងនាមសហគ្រាសជាទៀងទាត់។

គ. ពុំមានសិទ្ធិក្នុងការចុះកិច្ចសន្យា ប៉ុន្តែធានាការបញ្ជាទិញទាំងស្រុង ឬស្ទើរតែទាំងស្រុង ជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងខាងដើម ឱ្យសហគ្រាសផ្ទាល់ ឬឱ្យសហគ្រាសនោះ និងសហគ្រាសដទៃទៀតដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រាសនោះ ឬមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើសហគ្រាសនោះ ឬ

ឃ. ផលិត ឬកែច្នៃទំនិញដែលជារបស់សហគ្រាសនោះនៅក្នុងរដ្ឋខាងដើម។

៧- ក. សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង មិនត្រូវចាត់ទុកថាមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ដោយគ្រាន់តែប្រកបអាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ តាមរយៈឈ្មួញកណ្ដាល ភ្នាក់ងារកម្រៃជើងសារទូទៅ ឬភ្នាក់ងារដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបុគ្គលទាំងនោះ បំពេញសកម្មភាពដែលជាដំណើរការប្រក្រតីនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារនោះធ្វើសកម្មភាពទាំងស្រុង ឬស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងនាមសហគ្រាសមួយ ឬសហគ្រាសច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ រួមបញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ ភ្នាក់ងារនោះ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ក្នុងន័យនៃកថាខណ្ឌ នេះទេ។

ខ. សម្រាប់គោលដៅនៃមាត្រានេះ បុគ្គលម្នាក់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសហគ្រាសមួយ ក្នុងករណីដែលបុគ្គលគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឬសហគ្រាសគ្រប់គ្រងបុគ្គល ឬបុគ្គល និងសហគ្រាសនោះ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងតែមួយដោយបុគ្គល ឬសហគ្រាសផ្សេងទៀត ដោយផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែង និងកាលៈទេសៈពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ បុគ្គលម្នាក់ត្រូវចាត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសហគ្រាសមួយ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលលើសពី ៥០ ភាគរយនៃសិទ្ធិដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្នុងសហគ្រាសនោះ (ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន សំដៅដល់ចំនួនលើសពី ៥០ ភាគរយ នៃសំឡេងឆ្នោតសរុប និងតម្លៃនៃភាគហ៊ុន ឬសិទ្ធិដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងក្រុមហ៊ុន) ឬក្នុងករណីបុគ្គលដទៃទៀតកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលលើសពី ៥០ ភាគរយ នៃសិទ្ធិដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ (ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន សំដៅដល់ចំនួនលើសពី ៥០ ភាគរយ

នៃសំឡេងឆ្នោតសរុប និងតម្លៃនៃភាគហ៊ុន ឬសិទ្ធិដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងក្រុមហ៊ុន) ពីបុគ្គល និងសហគ្រាសនោះ។

៨- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិខាងដើមនៃមាត្រានេះក៏ដោយ វៀរលែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រងបន្ត សហគ្រាសធានារ៉ាប់រងនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ត្រូវចាត់ទុកថាមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ប្រសិនបើសហគ្រាសនោះ ប្រមូលបុព្វលាភនៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ ឬធានារ៉ាប់រងហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋនោះ តាមរយៈបុគ្គលក្រៅពីភ្នាក់ងារមានលក្ខណៈឯករាជ្យដែលអនុវត្តតាមកថាខណ្ឌ៧។

៩- ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងគ្រប់គ្រង ឬត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ឬដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ (ទោះបីជាតាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមិនមែនតាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍) មិនត្រូវចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនណាមួយ ជាគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមហ៊ុនណាមួយទៀតឡើយ។

មាត្រា ៦
ប្រាក់ចំណូលពីអចលនទ្រព្យ

១- ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងពីអចលនទ្រព្យ (រួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលពីកសិកម្ម ឬរុក្ខាប្រមាញ់) ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ពាក្យ "អចលនទ្រព្យ" ត្រូវមានន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ ពាក្យនេះត្រូវរួមបញ្ចូលផងដែរនូវទ្រព្យបន្ទាប់បន្សំនៃអចលនទ្រព្យ បសុសត្វនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ សិទ្ធិដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ទូទៅ ដែលទាក់ទិននឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កើតចំណូល សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើអចលនទ្រព្យ និងសិទ្ធិទទួល បានការទូទាត់ក្នុងចំនួនជាក់លាក់ ឬប្រែប្រួលតាមលទ្ធផលជាក់ស្តែងសម្រាប់ការប្រកបអាជីវកម្ម ឬសិទ្ធិប្រកបអាជីវកម្មលើជម្រករ៉ែ ប្រភពធនធានរ៉ែ និងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត រួមបញ្ចូលឈើហុប និងផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងទៀត។ នាវា និងយន្តហោះ មិនត្រូវចាត់ទុកជាអចលនទ្រព្យឡើយ។

៣- បញ្ញត្តិក្នុងកថាខណ្ឌ១ ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ ការជួល ឬការប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពផ្សេងទៀតនៃអចលនទ្រព្យ។

៤- បញ្ញត្តិក្នុងកថាខណ្ឌ១ និង៣ ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះប្រាក់ចំណូលពីអចលនទ្រព្យរបស់សហគ្រាស និងចំពោះប្រាក់ចំណូលពីអចលនទ្រព្យដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យ។

មាត្រា ៧

ប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្ម

១- ប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ត្រូវជាប់ពន្ធតែក្នុងរដ្ឋនោះប៉ុណ្ណោះ វៀរលែងតែសហគ្រាសនោះ ប្រកបអាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិ-ន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

ក្នុងករណីដែលសហគ្រាសនោះប្រកបអាជីវកម្មដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសអាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ លើតែប្រាក់ចំណេញណាដែលសម្រេចបានពី÷

ក- គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នោះ

ខ- ការលក់ផលិតផលឬទំនិញ ដែលមានប្រភេទដូចគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ទៅនឹងផលិតផលដែលលក់តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ឬ

គ- សកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ដែលមានប្រភេទដូចគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ទៅនឹងសកម្មភាពរបស់គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- សម្រាប់គោលដៅបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ៣ ក្នុងករណីសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ប្រាក់ចំណេញដែលកើតពីគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ដូចប្រាក់ចំណេញនៃសហគ្រាសផ្សេងទៀត និងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មដូច ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូច ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មឯករាជ្យទាំងស្រុងពីសហគ្រាសដែលមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នោះ។

៣- ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យកាត់កងរាល់ចំណាយទាំងអស់ ដែលកើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នោះ រួមបញ្ចូលទាំងចំណាយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងរដ្ឋបាលទូទៅដែលកើតនៅក្នុងរដ្ឋដែលគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅ ឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែការកាត់កងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចំពោះទឹកប្រាក់ (ក្រៅពីសំណងនៃចំណាយជាក់ស្តែង) ដែលទូទាត់ ដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ទៅទីស្នាក់ការកណ្តាល ឬការិយាល័យណាមួយផ្សេងទៀតរបស់សហគ្រាសក្រោមរូបភាពជាសួយសារ កម្រៃ ឬការទូទាត់

ប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានការប្រើប្រាស់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត ឬក្រោមរូបភាពជាកម្រៃជើងសារ សម្រាប់ការបំពេញសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬ ការគ្រប់គ្រង ឬក្រោមរូបភាពជាការប្រាក់នៃកម្ចីដែលបានផ្តល់ឱ្យគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ វៀរលែងតែក្នុងករណីសហគ្រាសធនាគារ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការកំណត់ប្រាក់ចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យគិតបញ្ចូលនូវទឹកប្រាក់ (ក្រៅពីសំណងនៃចំណាយជាក់ស្តែង) ដែលគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍កំណត់យកពីទីស្នាក់ការកណ្តាល ឬការិយាល័យណាមួយផ្សេងទៀតរបស់សហគ្រាសក្រោមរូបភាពជាសួយសារ កម្រៃ ឬការទូទាត់ប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានការប្រើប្រាស់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត ឬក្រោមរូបភាពជាកម្រៃជើងសារ សម្រាប់ការបំពេញសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬការគ្រប់គ្រង ឬក្រោមរូបភាពជាការប្រាក់នៃកម្ចីដែល បានផ្តល់ឱ្យទីស្នាក់ការកណ្តាល ឬការិយាល័យណាមួយផ្សេងទៀតរបស់សហគ្រាស វៀរលែងតែ ក្នុងករណីសហគ្រាសធនាគារ។

៤- ដរាបណារដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង មានទម្លាប់ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ចំណេញសម្រេចបានពីគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយវិធីបែងចែកប្រាក់ចំណេញសរុបទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗរបស់សហគ្រាស កថាខណ្ឌ២ មិនត្រូវរារាំងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងនោះក្នុងការកំណត់ប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវជាប់ពន្ធ តាមវិធីនៃការបែងចែកដែលជាទម្លាប់នេះ។ ការអនុវត្តវិធីនៃការបែងចែកនេះត្រូវផ្តល់លទ្ធផលដែលសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ក្នុងមាត្រានេះ។

៥- សម្រាប់គោលដៅនៃបណ្តាកថាខណ្ឌខាងលើនេះ ការកំណត់ប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបានដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវប្រើប្រាស់វិធាន ដូចគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ការអនុវត្តផ្ទុយពីនេះ អាចប្រព្រឹត្តទៅបាន លុះត្រាតែមានហេតុផលសមរម្យ និងគ្រប់គ្រាន់។

៦- ក្នុងករណីដែលប្រាក់ចំណេញរួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗ ដែលបានចែងដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមាត្រាផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បញ្ញត្តិរបស់មាត្រាទាំងនោះមិនត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ ដោយបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះទេ។

មាត្រា ៨
ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវា និងយន្តហោះ

១- ប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ពីប្រតិបត្តិការនៃយន្តហោះក្នុងចរាចរណ៍អន្តរជាតិ ត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

២- ប្រាក់ចំណេញពីប្រភពផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ដែលទទួលបានដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ពីប្រតិបត្តិការនៃនាវាក្នុងចរាចរណ៍អន្តរជាតិ អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីខាងដើម ប៉ុន្តែការកំណត់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋនោះ ត្រូវកាត់បន្ថយ ៥០ ភាគរយ។

៣- បញ្ញត្តិក្នុងកថាខណ្ឌ១ និង២ ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះប្រាក់ចំណេញពីការចូលរួមជាក្រុម ឬចង្កោមអាជីវកម្មរួមគ្នា ឬទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

មាត្រា ៩
សហគ្រាសដែលមានការទាក់ទងគ្នា

១- ក្នុងករណី÷

ក. សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្នុងការចាត់ចែង ការគ្រប់គ្រង ឬមានដើមទុននៅក្នុងសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ឬ

ខ. បុគ្គលតែមួយ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្នុងការចាត់ចែង ការគ្រប់គ្រង ឬមានដើមទុននៅក្នុងសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង និងសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត

ហើយនៅក្នុងករណីមួយណាក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើង ឬកំណត់ រវាងសហគ្រាសទាំងពីរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលខុសគ្នាពីលក្ខខណ្ឌ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងបណ្តាសហគ្រាសឯករាជ្យ ដូចនេះ ប្រាក់ចំណេញដែលអាចត្រូវបង្គរដោយសហគ្រាសណាមួយនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាស ដែលមានទំនាក់ទំនងទាំងនោះ ប៉ុន្តែពុំត្រូវបង្គរជាប្រាក់ចំណេញដោយហេតុផលនៃបណ្តាលក្ខខណ្ឌខាងលើ ប្រាក់ចំណេញនោះក៏អាចត្រូវរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសនោះ និងត្រូវជាប់ពន្ធស្របតាមនីតិវិធីនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។

២- ក្នុងករណីរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតទៅក្នុងប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីដំបូង ហើយបានយកពន្ធទៅតាមនីតិវិធីជាធរមាន ដែលប្រាក់ចំណេញដែលបានរាប់បញ្ចូលនោះ ត្រូវបានយកពន្ធរួចហើយដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ហើយប្រាក់ចំណេញដែលដាក់បញ្ចូលនោះគឺជាប្រាក់ចំណេញដែលគួរត្រូវបានទទួលដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើឡើងរវាងសហគ្រាសទាំងពីរនេះ ដូចលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើរវាងសហគ្រាសឯករាជ្យ ដូចនេះ រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតត្រូវធ្វើនិយ័តកម្មឱ្យសមស្របចំពោះប្រាក់ពន្ធដែលជាប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន។ ក្នុងការកំណត់និយ័តកម្មនេះ បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវអនុវត្តជាចាំបាច់ ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នា ប្រសិនបើមានការចាំបាច់។

៣- ក្នុងករណីដែលដំណើរការនីតិវិធីតុលាការ បែបបទរដ្ឋបាល ឬដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលនាំឱ្យមានការសម្រេចជាស្ថាពរថា ដោយបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពនានា ដែលបណ្តាលឱ្យមាននិយ័តកម្ម លើប្រាក់ចំណេញក្រោមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ ចំពោះសហគ្រាសដែលទាក់ទិននឹងទោសទណ្ឌដោយការក្លែងបន្លំ ការធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរ ឬដោយចេតនា បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ២ មិនត្រូវយកមកអនុវត្ត។

មាត្រា ១០

ភាគលាភ

១- ភាគលាភដែលត្រូវបានទូទាត់ដោយក្រុមហ៊ុននិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ឱ្យទៅនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ភាគលាភនោះក៏អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រុមហ៊ុនទូទាត់ភាគលាភនោះ ជានិវាសនជនផងដែរ ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃភាគលាភនោះ ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត បន្ទុកពន្ធដែលត្រូវបង់មិនត្រូវលើសពី ១០ភាគរយ នៃចំនួនដុល នៃភាគលាភ។ កថាខណ្ឌនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការយកពន្ធលើក្រុមហ៊ុនចំពោះប្រាក់ចំណេញដែលជាប្រភពនៃភាគលាភដែលបានទូទាត់។

៣- ពាក្យ "ភាគលាភ" ដែលប្រើក្នុងមាត្រានេះ សំដៅដល់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីភាគហ៊ុននានា ឬសិទ្ធិផ្សេងៗដែលមិនមែនជាឥណទេយ្យបំណុល ប៉ុន្តែចូលរួមទទួលប្រាក់ចំណេញ ក៏ដូចជាចំណូលបានមកពីសិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានកំណត់ពន្ធដូចគ្នាទៅនឹងប្រាក់ចំណូលបានពីភាគហ៊ុន ដែលកំណត់ដោយច្បាប់នៃរដ្ឋដែលក្រុមហ៊ុនបែងចែកភាគលាភនោះជានិវាសនជន។

៤- បញ្ញត្តិក្នុងកថាខណ្ឌ១ និង២ មិនត្រូវយកមកអនុវត្ត ប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃភាគលាភជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនទូទាត់ភាគលាភជានិវាសនជន តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យ តាមរយៈមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលនាំឱ្យមានការទូទាត់ភាគលាភនោះ មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នោះ។ ចំពោះករណីនេះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ ឬមាត្រា១៥ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៥- គ្មានបញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានបកស្រាយក្នុងការរារាំងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងពីការកំណត់ពន្ធលើការដកប្រាក់ចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ចេញពីរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយអនុលោមទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិនានានៃច្បាប់ក្នុងស្រុក។ ប៉ុន្តែពន្ធដែលបានកំណត់ មិនត្រូវលើសពីអត្រាដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងកថាខណ្ឌ២ នៃមាត្រានេះ។

៦-	ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ទទួលប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ចំណូលមកពីរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត រដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ អាចមិនត្រូវកំណត់ពន្ធទៅលើភាគលាភដែលបានទូទាត់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីដំបូងនោះទេ លើកលែងតែភាគលាភទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់ទៅឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋម្ខាងទៀត ឬការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលនាំឱ្យមានការទូទាត់ភាគលាភនោះ មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ។ ដូចនេះ ប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានបែងចែករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីដំបូង មិនគួរជាកម្មវត្ថុនៃការកំណត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមិនបានបែងចែករបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ទោះបីជាភាគលាភដែលបានទូទាត់ ឬប្រាក់ចំណេញ មិនបានបែងចែក មានចំណែកខ្លះ ឬទាំងស្រុងពីប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ចំណូលដែលបានកើតឡើងក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ក៏ដោយ។

មាត្រា ១១
ការប្រាក់

១- ការប្រាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ហើយត្រូវបានទូទាត់ទៅឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ការប្រាក់នោះក៏អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលការប្រាក់នោះកើតឡើងផងដែរ និងអនុលោមតាមច្បាប់នៃរដ្ឋនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃការប្រាក់នោះជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត បន្ទុកពន្ធដែលត្រូវបង់មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០ ភាគរយ នៃចំនួនដុលនៃការប្រាក់នោះទេ។

៣- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ២ ក៏ដោយ ការប្រាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង និងបានទូទាត់ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធនាគារកណ្តាល ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែល ភាគហ៊ុន ១០០ ភាគរយ កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ត្រូវបានលើកលែងពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋខាងដើម។

ក. សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី÷

(i) ធនាគារឥណ្ឌូនេស៊ី (ធនាគារកណ្តាលនៃឥណ្ឌូនេស៊ី)

(ii) លេមបាហ្កា ពិមប៊ីយ៉ាយ៉ាន អេកស្ព័រ ឥណ្ឌូនេស៊ី (ធនាគារអ៊ិចស៊ិមនៃឥណ្ឌូនេស៊ី)

(iii) បាដាន ពេនយ៉េលេងហ្គារ៉ា ចាមីណាន សូស្យ៉ាល់ កេសេហាតាន (ទីភ្នាក់ងារសន្តិសង្គមសម្រាប់សុខភាពនៃឥណ្ឌូនេស៊ី)

(iv) បាដាន ពេនយ៉េលេងហ្គារ៉ា ចាមីណាន សូស្យ៉ាល់ កេតេនាហ្គកឹចាន (ទីភ្នាក់ងារសន្តិសង្គមសម្រាប់ពលករ)

(v) នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងស្ថាប័នដទៃទៀតដូចដែលអាចព្រមព្រៀងគ្នាទៅពេលក្រោយរវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ។

ខ. សម្រាប់កម្ពុជា÷

(i) ធនាគារកណ្តាល ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

(ii) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

(iii) បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និង

(iv) នីតិបុគ្គលសាធារណៈ

ឬស្ថាប័នដទៃទៀតដូចដែលអាចព្រមព្រៀងគ្នានាពេលក្រោយរវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ។

៤- ពាក្យ "ការប្រាក់" ដែលប្រើក្នុងមាត្រានេះសំដៅដល់ចំណូលពីបំណុលគ្រប់ប្រភេទ ទោះបីជាបានឬមិនបានធានាដោយការដាក់វត្ថុបញ្ចាំ និងមានឬគ្មានសិទ្ធិទទួលបានការបែងចែកប្រាក់ចំណេញរបស់កូនបំណុលនិងជាពិសេសចំណូលដែលបានមកពីមូលបត្ររដ្ឋ និងចំណូលដែលបានមកពីសញ្ញាប័ណ្ណ ឬមូលបត្របំណុល រួមបញ្ចូលផងដែរនូវបុព្វលាភ និងរង្វាន់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងមូលបត្ររដ្ឋ សញ្ញាប័ណ្ណ ឬមូលបត្របំណុលទាំងនោះ ក៏ដូចជាចំនួនទឹកប្រាក់នានាដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រាក់ចំណូលបានពីការឱ្យខ្ចីដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលប្រាក់ចំណូលកើតឡើង។ សម្រាប់គោលបំណងនៃមាត្រានេះ ប្រាក់ពិន័យដែលបានមកពីការបង់យឺតយ៉ាវ មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រាក់ឡើយ។

៥- បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ មិនត្រូវយកមកអនុវត្ត ប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃការប្រាក់ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតដែលការប្រាក់នោះកើតឡើង តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យតាមរយៈមូលដ្ឋានជាប់លាប់ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ និងបំណុលដែលនាំឱ្យមានការទូទាត់ការប្រាក់នោះ មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយ ក) គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ឬជាមួយ ខ) សកម្មភាពអាជីវកម្មដូចមានចែងក្នុងចំណុច គ) នៃកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រា៧។ ចំពោះករណីនេះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ ឬមាត្រា១៥ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៦- ការប្រាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង នៅពេលដែលអ្នកទូទាត់ការប្រាក់គឺជានិវាសនជននៃរដ្ឋនោះ។ ទោះបីបុគ្គលបង់ការប្រាក់ជានិវាសនជន ឬមិនមែនជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយ ប៉ុន្តែមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលមានការទាក់ទិននឹងបំណុលត្រូវបង់ការប្រាក់ ហើយការប្រាក់នោះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ដូចនេះ

ការប្រាក់នោះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដែលគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ស្ថិតនៅ។

៧- ក្នុងករណី មានទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងអ្នកទូទាត់ការប្រាក់និងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផល ឬរវាងបុគ្គលទាំងពីរ និងបុគ្គលដទៃទៀត ចំនួនការប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុល មានចំនួនលើសពីចំនួនការប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទូទាត់ការប្រាក់ និងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសបែបនោះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀង ក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីនេះ ចំណែកលើសនៃការទូទាត់ ត្រូវជាប់ពន្ធស្របទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ និងអនុលោមតាមបញ្ញត្តិផ្សេងទៀត នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

មាត្រា ១២
ស្ងួយសារ

១- ស្ងួយសារដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ហើយត្រូវបានទូទាត់ទៅឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ស្ងួយសារនោះ ក៏អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ងួយសារនោះកើតឡើងផងដែរនិងអនុលោមតាមច្បាប់នៃរដ្ឋនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃស្ងួយសារនោះ ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត បន្ទុកពន្ធដែលត្រូវបង់មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០ ភាគរយ នៃចំនួនដុលនៃស្ងួយសារនោះទេ។

៣- ពាក្យ "ស្ងួយសារ" ដែលប្រើក្នុងមាត្រានេះ សំដៅដល់ការទូទាត់ណាមួយជាសំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៃស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រ ការងារសិល្បៈឬវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលរួមមាន ខ្សែភាពយន្តឬភាពយន្ត ឬខ្សែអាត់ដែលប្រើសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ពាណិជ្ជសញ្ញា ការរចនាម៉ូដឬម៉ូដែល ប្លង់ រូបមន្តឬរបៀបធ្វើសម្ងាត់ ឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់បរិក្ខារឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬវិទ្យាសាស្ត្រ ឬសម្រាប់ព័ត៌មានដែលទាក់ទិននឹងបទពិសោធន៍ខាងឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬវិទ្យាសាស្ត្រ។

៤- បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ នៃមាត្រានេះ មិនត្រូវយកមកអនុវត្ត ប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃស្ងួយសារជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតដែលស្ងួយសារកើតឡើង តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យ តាមរយៈមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ និងសិទ្ធិឬទ្រព្យដែលនាំឱ្យមានការទូទាត់ស្ងួយសារនោះ មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយ ក) គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬ មូលដ្ឋានជាប់លាប់ ឬជាមួយ ខ) សកម្មភាពអាជីវកម្មដូចមានចែងក្នុងចំណុច គ) នៃកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រា៧។ ចំពោះករណីនេះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ ឬមាត្រា១៥ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៥- ស្ហួយសារត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង នៅពេលដែលអ្នកបង់ សួយសារគឺជានិវាសនជននៃរដ្ឋនោះ។ ទោះបីបុគ្គលបង់សួយសារជានិវាសនជន ឬមិនមែនជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយ ប៉ុន្តែមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលមានការទាក់ទិននឹងបំណុលនៃសួយសារត្រូវបង់ ហើយសួយសារនោះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ដូចនេះសួយសារនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដែលគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ស្ថិតនៅ។

៦- ក្នុងករណី មានទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងអ្នកបង់សួយសារនិងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផល ឬរវាងអ្នកទាំងពីរនិងបុគ្គលដទៃទៀត ចំនួនសួយសារដែលត្រូវបង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិ ឬព័ត៌មាន មានចំនួនលើសពីចំនួនសួយសារដែលបានព្រមព្រៀងរវាងអ្នកបង់សួយសារ និងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផល ក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសបែបនោះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីនេះ ចំណែកលើសនៃការទូទាត់ ត្រូវជាប់ពន្ធស្របទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ និងអនុលោមតាមបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

មាត្រា ១៣
កម្រៃសេវាបច្ចេកទេស

១- កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ហើយត្រូវបានទទួល ដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនោះ ក៏អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនោះកើតឡើងផងដែរ និងអនុលោមតាមច្បាប់នៃរដ្ឋនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត បន្ទុកពន្ធដែលត្រូវបង់មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០ ភាគរយ នៃចំនួនដុល នៃកម្រៃសេវាបច្ចេកទេស។

៣- ពាក្យ "កម្រៃសេវាបច្ចេកទេស" សំដៅដល់ការទូទាត់គ្រប់ប្រភេទជាសំណងសម្រាប់ការបំពេញសេវាគ្រប់គ្រង បច្ចេកទេស ឬពិគ្រោះយោបល់ រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់សេវាកម្មដោយសហគ្រាស តាមរយៈបុគ្គលិកបច្ចេកទេស ឬបុគ្គលិកផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលការទូទាត់លើសេវានានា ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤- បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ នៃមាត្រានេះ មិនត្រូវអនុវត្តឡើយ ប្រសិនបើម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលនៃកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតដែលកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសកើតឡើង តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ហើយកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនោះ មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយ ក) គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬ មូលដ្ឋានជាប់លាប់ ឬជាមួយ ខ) សកម្មភាពអាជីវកម្មដូចមានចែងក្នុងចំណុច គ) នៃកថាខណ្ឌ១នៃមាត្រា៧។ ចំពោះករណីនេះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ ឬមាត្រា១៥ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៥- កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង នៅពេលដែលអ្នកទូទាត់កម្រៃគឺជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ។ ទោះបីបុគ្គលទូទាត់កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសជានិវាសនជន ឬមិនមែនជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយ ប៉ុន្តែមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

ដែលមានការទាក់ទិននឹងកាតព្វកិច្ចទូទាត់កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសដែលកើតឡើង ហើយកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនោះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ទាំងនោះ ដូច្នេះកម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ស្ថិតនៅ។

៦- ក្នុងករណី មានទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងបុគ្គលទូទាត់កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសនិងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផល ឬរវាងបុគ្គលទាំងពីរ និងបុគ្គលដទៃទៀត ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ កម្រៃសេវាបច្ចេកទេសដែលត្រូវទូទាត់ មានចំនួនលើសពីកម្រៃសេវាបច្ចេកទេស ដែលគួរតែបានព្រមព្រៀងរវាងបុគ្គលទូទាត់ និងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសបែបនោះ ដូចនេះបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀង ក្នុងករណីពុំមានទំនាក់ទំនងពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីនេះ ចំណែកលើសនៃការទូទាត់ ត្រូវជាប់ពន្ធស្របទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ និងអនុលោមតាមបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

មាត្រា ១៤
ចំណេញមូលធន

១- ចំណេញមូលធន ដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ពីការលក់ឬផ្ទេរអចលនទ្រព្យ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦ ហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ចំណេញមូលធនពីការលក់ឬផ្ទេរចលនទ្រព្យ ដែលជាចំណែកនៃទ្រព្យអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានអចិ-ន្ត្រៃយ៍ ដែលសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងមាននៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ឬចំណេញមូលធនពីការលក់ឬផ្ទេរចលនទ្រព្យ ជាប់ទាក់ទិននឹងមូលដ្ឋានជាប់លាប់របស់និវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត សម្រាប់គោលដៅនៃការបំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យ រួមបញ្ចូលទាំងចំណេញមូលធនពីការលក់ឬផ្ទេរគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ (គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍តែឯង ឬជាមួយសហគ្រាសទាំងមូល) ឬពីការលក់ឬផ្ទេរមូលដ្ឋានជាប់លាប់ អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

៣- ចំណេញមូលធនដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ពីការលក់ឬផ្ទេរនាវា ឬយន្តហោះដែលប្រតិបត្តិការក្នុងចរាចរណ៍អន្តរជាតិ ឬពីការលក ឬផ្ទេរចលនទ្រព្យដែលជាប់ទាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការនៃនាវា ឬយន្តហោះ ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងនោះ តែប៉ុណ្ណោះ។

៤- ចំណេញមូលធនដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ពីការលក់ឬផ្ទេរភាគហ៊ុនដែលលើសពី ៥០ ភាគរយ នៃតម្លៃភាគហ៊ុននោះ បានមកដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីអចលនទ្រព្យ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

៥- ចំណេញមូលធនពីការលក់ឬផ្ទេរទ្រព្យទាំងឡាយ ក្រៅពីទ្រព្យដូចមានចែងនៅក្នុងបណ្ដាកថាខណ្ឌខាងលើនៃមាត្រានេះ ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលអ្នកលក់ឬផ្ទេរ ជានិវាសនជន។

មាត្រា ១៥
សេវាបុគ្គលឯករាជ្យ

១- តាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា១៣ ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយរូបវន្តបុគ្គលដែលជានិវាសនជន នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ពីការបំពេញសេវាវិជ្ជាជីវៈ ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមានចរិតលក្ខណៈឯករាជ្យ ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះប៉ុណ្ណោះ លើកលែងតែករណីដូចខាងក្រោម ដែលប្រាក់ចំណូលទាំងនោះ ក៏អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតផងដែរ÷

ក. ប្រសិនបើរូបវន្តបុគ្គលនោះ មានមូលដ្ឋានជាប់លាប់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ក្នុងគោលបំណងបំពេញសកម្មភាពរបស់គាត់។ ក្នុងករណីនេះ មានតែចំណូលដែលសម្រេចបានតាមរយៈមូលដ្ឋានជាប់លាប់នោះប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ ឬ

ខ. ប្រសិនបើរូបវន្តបុគ្គលនោះ មានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតសម្រាប់រយៈពេលមួយលើក ឬច្រើនលើក ស្មើ ឬលើសពីចំនួនសរុប ១៨៣ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ណាមួយ ហើយក្នុងករណីនេះ មានតែចំណូលទទួលបានពីសកម្មភាព ដែលបានបំពេញនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅរដ្ឋនោះ។

២- ពាក្យ "សេវាវិជ្ជាជីវៈ" រួមបញ្ចូលជាពិសេសសកម្មភាពឯករាជ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រ អក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈ អប់រំ ឬបង្រៀន ព្រមទាំងសកម្មភាពឯករាជ្យរបស់គ្រូពេទ្យ មេធាវី វិស្វករ ស្ថាបត្យករ ទន្តពេទ្យ និងគណនេយ្យករ។

មាត្រា ១៦
សេវាបុគ្គលមិនឯករាជ្យ

១- សម្រាប់គោលដៅបញ្ញត្តិនៃមាត្រា១៧ មាត្រា១៩ និងមាត្រា២០ ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួល និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ក្នុងការបំពេញការងារ ត្រូវជាប់ពន្ធតែក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះប៉ុណ្ណោះ វៀរលែងតែការបំពេញការងារនោះ ធ្វើឡើងនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។ ប្រសិនបើការបំពេញការងារនោះ ធ្វើឡើងនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត លាភការដែលទទួលបាន អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ ក៏ដោយ លាភការដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ក្នុងការបំពេញការងារនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ត្រូវជាប់ពន្ធតែក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ÷

ក. អ្នកទទួលលាភការមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀត មួយលើក ឬច្រើនលើកដែលសរុបមិនលើសពី ១៨៣ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ណាមួយ និង

ខ. លាភការត្រូវបានបង់ដោយ ឬក្នុងនាមនិយោជកដែលមិនមែនជានិវាសនជននៃរដ្ឋម្ខាងទៀត និង

គ. លាភការមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់ដែលនិយោជកមាននៅរដ្ឋម្ខាងទៀត។

៣- ទោះបីជាមានបណ្ដាបញ្ញត្តិខាងលើនៃមាត្រានេះក៏ដោយ លាភការដែលទទួលបានក្នុងការបំពេញការងារនៅលើនាវា ឬយន្តហោះ ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងចរាចរណ៍អន្តរជាតិ ដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋនោះ។

មាត្រា ១៧
កម្រៃរបស់អភិបាល

១- កម្រៃ និងការទូទាត់ប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត របស់អភិបាលដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬរចនាសម្ព័ន្ធប្រហាក់ប្រហែលរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជានិវាសនជនរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួល និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដែលទទួលដោយនិវាសនជន នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុងនាមជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីម្ខាងទៀត ត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

មាត្រា ១៨
សិល្បករ និងកីឡាករ

១- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃមាត្រា១៥ និងមាត្រា១៦ ក៏ដោយ ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ក្នុងនាមជាសិល្បករល្ខោន អ្នកសម្តែងភាពយន្ត សិល្បករតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ ឬតន្ត្រីករ ឬក្នុងនាមជាកីឡាករ តាមរយៈសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និវាសនជននោះ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

២- ក្នុងករណីដែលប្រាក់ចំណូលរបស់សិល្បករ/អ្នកសម្តែង ឬកីឡាករ សម្រេចបានតាមរយៈសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដែលប្រាក់ចំណូលនោះមិនបានបង្គរទុកនៅសិល្បករ/អ្នកសម្តែង ឬកីឡាករនោះផ្ទាល់ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្គរទុកនៅបុគ្គលផ្សេងទៀត ដូចនេះប្រាក់ចំណូលនោះ អាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសកម្មភាពរបស់សិល្បករ/អ្នកសម្តែង ឬកីឡាករនោះកើតឡើង ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ មាត្រា១៥ និងមាត្រា១៦ ក៏ដោយ។

៣- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ នៃមាត្រានេះ ក៏ដោយ ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីសកម្មភាពដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រានេះ ដែលបានបំពេញក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ វប្បធម៌ ឬកីឡាដែលបានព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាង ត្រូវទទួលបានការលើកលែងពន្ធក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសកម្មភាពទាំងនោះកើតឡើង។

មាត្រា ១៩
ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ធនលាភ និងការទូទាត់របបសន្តិសុខសង្គម

១- តាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ២ នៃមាត្រា២០ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ធនលាភ និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដែលបានទូទាត់ឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ចំពោះការបំពេញការងារកន្លងមក អាចត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅរដ្ឋម្ខាងនោះ។

២- ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ធនលាភ និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀតនោះ ក៏អាចត្រូវជាប់ពន្ធផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ប្រសិនបើការទូទាត់នោះធ្វើឡើងដោយនិវាសនជន ឬគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋនោះ។

ពាក្យ "ធនលាភ" សំដៅដល់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់ជាដំណាក់កាលទៀងទាត់ តាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ក្នុងអំឡុងអាយុកាលនៃអ្នកទទួលធនលាភ ឬក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់ដើម្បីទទួលបានជាសំណងនៃទឹកប្រាក់ ឬសំណងដែលមានតម្លៃស្មើ។

៣- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ ក៏ដោយ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងប្រាក់ទូទាត់ផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានទូទាត់ក្រោមកម្មវិធីសាធារណៈ ឬកម្មវិធីដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះប៉ុណ្ណោះ។

មាត្រា ២០
ការបំពេញសេវាឱ្យរដ្ឋាភិបាល

១- ក. ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួល និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដែលបានទូទាត់ដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬនីតិបុគ្គលសាធារណៈនៃរដ្ឋភាគីម្ខាង ឱ្យទៅរូបវន្តបុគ្គលដែលបានបំពេញសេវាឱ្យរដ្ឋ ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬនីតិបុគ្គលសាធារណៈទាំងនោះ ត្រូវជាប់ពន្ធតែក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះប៉ុណ្ណោះ។

ខ. ប៉ុន្តែ ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួល និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀតខាងលើ ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើសេវាត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ដោយរូបវន្តបុគ្គលដែលជានិវាសនជននៃរដ្ឋនោះ÷

(i) ជាជនជាតិនៃរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ឬ

(ii) មិនមែនជានិវាសនជនដោយគ្រាន់តែក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ

២- ក. ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ ក៏ដោយ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ដែលបានទូទាត់ដោយ ឬទទួលបានពីមូលនិធិដែលបង្កើតដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋភាគីម្ខាងឱ្យទៅរូបវន្តបុគ្គលដែលបានបំពេញសេវាឱ្យរដ្ឋ ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬនីតិបុគ្គលសាធារណៈទាំងនោះត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះប៉ុណ្ណោះ។

ខ- ប៉ុន្តែ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀតខាងលើ ត្រូវជាប់ពន្ធតែនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើរូបវន្តបុគ្គលនោះគឺជានិវាសនជននិងជាជនជាតិនៃរដ្ឋនោះ។

៣- បញ្ញត្តិនៃមាត្រា១៦ មាត្រា១៧ មាត្រា១៨ និងមាត្រា១៩ ត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួល ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងលាភការប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត ចំពោះការបំពេញសេវា ដែលទាក់ទិននឹងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬនីតិបុគ្គលសាធារណៈទាំងនោះ។

មាត្រា ២១
សិស្ស/និស្សិត និងអ្នកហាត់ការ

១- ការទូទាត់សម្រាប់ការទ្រទ្រង់ជីវភាព ឬអប់រំ ឬបណ្តុះបណ្តាលឱ្យសិស្ស/និស្សិត ឬអ្នកហាត់ការអាជីវកម្ម ឬកូនជាង ដែលជានិវាសនជន ឬថ្មីៗធ្លាប់ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត មុនពេលចេញទៅបំពេញការសិក្សានៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង និងមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងនោះ សម្រាប់តែគោលបំណងនៃការសិក្សាឬបណ្តុះបណ្តាល មិនត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋនោះឡើយ ប្រសិនបើការទូទាត់មានប្រភពពីខាងក្រៅរដ្ឋនោះ។

២- ចំពោះជំនួយឥតសំណង អាហារូបករណ៍ និងលាភការពីការបំពេញការងារដែលមិនគ្របដណ្តប់ក្រោមវិសាលភាពនៃកថាខណ្ឌ១ សិស្ស/និស្សិត ឬអ្នកហាត់ការអាជីវកម្ម ឬកូនជាងដូចបានរៀបរាប់ក្នុងកថាខណ្ឌ១ ត្រូវទទួលបានបន្ថែមនូវការលើកលែង ការអនុគ្រោះ ឬការកាត់បន្ថយពន្ធទាំងឡាយដូចគ្នាជាមួយនឹងនិវាសនជននៃរដ្ឋដែលបុគ្គលនោះកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលការអប់រំ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

មាត្រា ២២
គ្រូបង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវ

១- រូបវន្តបុគ្គលដែលជានិវាសនជន ឬថ្មីៗធ្លាប់ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង មុនពេលចេញទៅបំពេញការងារនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត និងដោយទទួលការអញ្ជើញពីសាកលវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាលារៀន ឬស្ថាប័នអប់រំប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងៗ ដែលបានទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល សារៈមន្ទីរ ឬស្ថាប័នវប្បធម៌ផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀត និងមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋនោះរយៈពេលមិនលើសពី ២ឆ្នាំជាប់គ្នា សម្រាប់តែគោលបំណងបង្រៀន ឬធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នទាំងនោះ ត្រូវលើកលែងពន្ធក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ លើចំណូលពីសកម្មភាពខាងលើ។

២- បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ មិនត្រូវយកមកអនុវត្ត ចំពោះប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវ ក្នុងករណីដែលការស្រាវជ្រាវនោះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបវន្តបុគ្គល សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឯកជនជាចម្បងរបស់បុគ្គលណាមួយ ឬបណ្តាបុគ្គលដទៃទៀត។

មាត្រា ២៣
ប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀត

១- ខ្ទង់ចំណូលរបស់និវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ទោះកើតឡើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលមិនមានចែងនៅក្នុងបណ្តាមាត្រាទាំងឡាយខាងដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវជាប់ពន្ធតែក្នុងរដ្ឋនោះប៉ុណ្ណោះ។

២- បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះប្រាក់ចំណូលនានា ក្រៅពីប្រាក់ចំណូលបានពីអចលនទ្រព្យ ដូចបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌ២ នៃមាត្រា៦ ប្រសិនបើអ្នកទទួលប្រាក់ចំណូលនោះ ជានិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រកបអាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត តាមរយៈគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបំពេញសេវាបុគ្គលឯករាជ្យ តាមរយៈមូលដ្ឋានជាប់លាប់ ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ និងសិទ្ធិ ឬទ្រព្យដែលនាំឱ្យមានការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលនោះ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ឬមូលដ្ឋានជាប់លាប់នោះ។ ចំពោះករណីនេះ បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៧ ឬមាត្រា១៥ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៣- ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ ក៏ដោយ ខ្ទង់ចំណូលរបស់និវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ដែលមិនមានចែងនៅក្នុងបណ្តាមាត្រាទាំងឡាយខាងដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយកើតឡើងក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត អាចត្រូវជាប់ពន្ធក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

មាត្រា ២៤

ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នា

១- ក្នុងករណីនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ទទួលបានប្រាក់ចំណូលដែលអាចត្រូវជាប់ពន្ធ នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ដោយអនុលោមតាមបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងនោះ ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យកាត់កងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់និវាសនជននោះនូវចំនួនប្រាក់ពន្ធស្មើ នឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលបានបង់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីម្ខាងទៀតនោះ។ ប៉ុន្តែការកាត់កង មិនត្រូវឱ្យលើសពីចំណែកនៃប្រាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដូចដែលបានគណនាមុនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកាត់កង ដែលការអនុញ្ញាតនេះ គឺត្រឹមកម្រិតប្រាក់ចំណូលដែលអាចត្រូវជាប់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

២- សម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្តល់ជាឥណទាននៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ប្រាក់ពន្ធដែលបានបង់ក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ត្រូវបានចាត់ទុកថារាប់បញ្ចូលនូវចំនួនប្រាក់ពន្ធដែលគួរតែបានបង់នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកលែង ឬកាត់បន្ថយ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាទាក់ទិននឹងការលើកទឹកចិត្ត ដែលរៀបចំឡើងសំដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ។

៣- សម្រាប់គោលដៅនៃកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រានេះ សម្រាប់កម្ពុជា ពាក្យ "ប្រាក់ពន្ធដែលបានបង់" មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនូវពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបន្ថែមលើការបែងចែកភាគលាភត្រូវបង់ទាក់ទិននឹងចំណូលដែលបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ២ នៃមាត្រានេះ អនុវត្ត។

មាត្រា ២៥
ការមិនរើសអើង

១- ជនជាតិនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង មិនត្រូវជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ចំពោះការយកពន្ធ ឬតម្រូវការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធ ដែលខុសពីឬមានបន្ទុកលើសពីការយកពន្ធឬតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ លើជនជាតិនៃរដ្ឋម្ខាងទៀតនោះក្នុងកាលៈទេសៈដូចគ្នាជាពិសេសទាក់ទិននឹងនិវាសនដ្ឋាន។

២- ការកំណត់ពន្ធចំពោះគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងមាននៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត មិនត្រូវទទួលបានការអនុគ្រោះលើការយកពន្ធតិចជាងសហគ្រាសរបស់រដ្ឋម្ខាងទៀតនោះ ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មដូចគ្នា។ បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវបានបកស្រាយថា រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ការអនុគ្រោះឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនូវចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ការអនុគ្រោះ និងការកាត់បន្ថយសម្រាប់គោលដៅសារពើពន្ធដោយសារតែស្ថានភាពគ្រួសារ ឬការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារដែលរដ្ឋម្ខាងនោះផ្តល់ឱ្យនិវាសនជនរបស់ខ្លួន។

៣- លើកលែងតែក្នុងករណីដែលបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រា៩ កថាខណ្ឌ៧ នៃមាត្រា១១ កថាខណ្ឌ៦ នៃមាត្រា១២ ឬកថាខណ្ឌ៦ នៃមាត្រា១៣ យកមកអនុវត្ត សម្រាប់គោលដៅកំណត់ពន្ធប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាស ការប្រាក់ សួយសារ កម្រៃសេវាបច្ចេកទេស និងការចំណាយផ្សេងៗ ដែលបានទូទាត់ដោយសហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ទៅឱ្យនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត ត្រូវកាត់កងបានក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា ដូចក្នុងករណីដែលការទូទាត់ទាំងនោះ ធ្វើឡើងចំពោះនិវាសនជននៃរដ្ឋភាគីដំបូង។

៤- សហគ្រាសនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ដែលមូលធនរបស់សហគ្រាសនោះ ត្រូវបានកាន់កាប់ឬគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឬមួយផ្នែក ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល ដោយនិវាសនជនមួយឬច្រើននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត មិនត្រូវជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋភាគីដំបូង ចំពោះការយកពន្ធឬតម្រូវការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធ ដែលខុសពីឬមានបន្ទុកលើសពីការយកពន្ធឬតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ ដែលត្រូវឬអាចអនុវត្តចំពោះសហគ្រាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋភាគីដំបូងនោះ។

៥- ពុំមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើរបស់មាត្រានេះ ត្រូវបានបកស្រាយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សម្បទានផ្នែកពន្ធ។

៦- ក្នុងមាត្រានេះ ពាក្យ "ការយកពន្ធ" សំដៅដល់ពន្ធទាំងឡាយណាដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

មាត្រា ២៦
នីតិវិធីនៃការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមក

១- ក្នុងករណីនិវាសជននៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង យល់ឃើញថាវាល់វិធានការនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ឬទាំងសងខាងបង្កឱ្យ ឬនឹងបង្កឱ្យមានការយកពន្ធលើបុគ្គលនោះដោយមិនអនុលោមតាមបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បុគ្គលនោះ អាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគាត់ជានិវាសនជន ឬទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលគាត់មានសញ្ជាតិ ប្រសិនបើបណ្តឹងតវ៉ារបស់គាត់ស្ថិតក្រោមកថាខណ្ឌ១ នៃមាត្រា២៤ ដោយពុំគិតពីដំណោះស្រាយតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋទាំងនោះ។ ការដាក់បណ្តឹងតវ៉ាត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងលើកដំបូងអំពីវិធានការនៃការយកពន្ធដែលមិនអនុលោមតាមបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

២- ប្រសិនបើបណ្តឹងតវ៉ាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយណាមួយដែលជាទីពេញចិត្តបានទេនោះ អាជ្ញាករមានសមត្ថកិច្ចត្រូវខិតខំដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានោះតាមរយៈការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតក្នុងគោលបំណងចៀសវាងការយកពន្ធដែលមិនអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៣- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាង ត្រូវខិតខំដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ឬចម្ងល់ផ្សេងៗដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយ ឬការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមក។ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋទាំងសងខាងអាចពិភាក្សាគ្នាផងដែរ ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នា ទោះជាក្នុងករណីមិនមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាងអាចធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាដោយផ្ទាល់ ក្នុងគោលបំណងឈានទៅដល់ការសម្រេចការព្រមព្រៀងគ្នាមួយ ស្របតាមបណ្តាកថាខណ្ឌខាងលើ។

មាត្រា ២៧
ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន

១- អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាងត្រូវផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទាំងឡាយ ដែលអាចរំពឹងទុកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តបញ្ញត្តិនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្ត ឬការដាក់បង្ខំឱ្យប្រតិបត្តិច្បាប់នានាក្នុងស្រុកទាក់ទិននឹងពន្ធគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ការបរិយាយដែលបានកំណត់ក្នុងនាមរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដរាបណាការកំណត់ពន្ធមិនផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានមិនត្រូវបានកំហិតដោយមាត្រា១ និងមាត្រា២ ឡើយ។

២- ព័ត៌មានដែលទទួលបានក្រោមកថាខណ្ឌ១ ដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានក្រោមច្បាប់ក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋនោះ និងត្រូវផ្តល់ឱ្យតែចំពោះបុគ្គល ឬអាជ្ញាធរ (រួមមានតុលាការ និងស្ថាប័នរដ្ឋបាលនានា) ទាក់ទិននឹងការកំណត់ ឬការប្រមូលពន្ធ ការដាក់បង្ខំឱ្យប្រតិបត្តិ ឬការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ ការសម្រេចលើបណ្តឹងតវ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ១ ឬការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ បុគ្គល ឬអាជ្ញាធរនោះ ត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់តែក្នុងគោលបំណងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គល ឬអាជ្ញាធរនោះ អាចបង្ហាញព័ត៌មានបាននៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការសាធារណៈ ឬនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ។ ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិខាងលើក៏ដោយ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀត ប្រសិនបើច្បាប់នៃរដ្ឋទាំងសងខាងអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតនោះ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋដែលផ្តល់ព័ត៌មាននោះអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់។

៣- ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ១ និង២ នៃមាត្រានេះ មិនត្រូវបានបកស្រាយថាជាការដាក់កំហិតឱ្យរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានកាតព្វកិច្ច÷

ក. ចាត់វិធានការផ្នែករដ្ឋបាលដែលមិនស្របតាមច្បាប់ និងការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ឬរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។

ខ. ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនអាចទទួលបានក្រោមច្បាប់ ឬដំណើរការរដ្ឋបាលជាប្រក្រតីនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ឬរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។

គ. ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីការសម្ងាត់ជំនួញ ធុរកិច្ច ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬវិជ្ជាជីវៈ ឬដំណើរការជំនួញ ឬព័ត៌មានដែលផ្ទុយនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈ (សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ)។

៤- ប្រសិនបើព័ត៌មានត្រូវបានស្នើសុំដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង អនុលោមតាមមាត្រានេះ រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតត្រូវប្រើវិធានការក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ ទោះបីជារដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀតនោះ មិនត្រូវការព័ត៌មាននោះ សម្រាប់ប្រើក្នុងគោលដៅពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ដោយ។ កាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងប្រយោគមុននេះ គឺអាស្រ័យលើដែនកំណត់នៃកថាខណ្ឌ៣ ប៉ុន្តែពុំមានការបកស្រាយថា ដែនកំណត់ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង បដិសេធក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន ដោយសារតែព័ត៌មាននោះពុំមានផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុក។

៥- ពុំមានករណីដែលបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌ៣ ត្រូវបានបកស្រាយថាមានការអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងបដិសេធក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន ដោយសារតែព័ត៌មាននោះកាន់កាប់ដោយធនាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត អ្នកដែលត្រូវបានចាត់តាំង ឬបុគ្គលប្រតិបត្តិក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារ ឬមានសមត្ថកិច្ច ឬដោយសារតែព័ត៌មាននោះ ទាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍នៃភាពជាម្ចាស់របស់បុគ្គលណាមួយឡើយ។

មាត្រា ២៨
សមាជិកបេសកកម្មទូត និងស្ថានកុងស៊ុល

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិសារពើពន្ធរបស់សមាជិកបេសកកម្មទូត ឬស្ថាន កុងស៊ុល ក្រោមវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ឬក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃការព្រមព្រៀងពិសេសនានាទេ។

មាត្រា ២៩
ការចូលជាធរមាន

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវចូលជាធរមាននៅកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលបានការជូនដំណឹងក្រោយគេ ដែលរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរ ជូនដំណឹងទៅវិញទៅមកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរយៈផ្លូវទូត អំពីការបំពេញចប់សព្វគ្រប់នូវនីតិវិធីដែលតម្រូវដោយច្បាប់ក្នុងស្រុក ដើម្បីឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមាន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត÷

ក. សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី÷

(i) ចំពោះពន្ធកាត់ទុកនៅប្រទេសប្រភព លើចំនួនទឹកប្រាក់ជាប់ពន្ធដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន និង

(ii) ចំពោះពន្ធដទៃទៀតលើប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន និង

ខ. សម្រាប់កម្ពុជា÷

(i) ចំពោះពន្ធកាត់ទុកនៅប្រទេសប្រភព លើចំនួនទឹកប្រាក់ជាប់ពន្ធដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន និងឆ្នាំប្រតិទិនបន្តបន្ទាប់ទៀត និង

(ii) ចំពោះពន្ធដទៃទៀត លើប្រាក់ចំណូលដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន និងឆ្នាំប្រតិទិនបន្តបន្ទាប់ទៀត។

មាត្រា ៣០
ការបញ្ចប់

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវនៅជាធរមាន រហូតដល់ពេលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង។ រដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈផ្លូវទូតដោយជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីការបញ្ចប់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា នៃឆ្នាំប្រតិទិនណាមួយ ក្រោយពីរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមាន។ ក្នុងករណីនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវឈប់មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត÷

ក. សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី÷

(i) ចំពោះពន្ធកាត់ទុកនៅប្រទេសប្រភព លើប្រាក់ចំណូលដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

(ii) ចំពោះពន្ធដទៃទៀតលើប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង

ខ. សម្រាប់កម្ពុជា÷

(i) ចំពោះពន្ធកាត់ទុកនៅប្រទេសប្រភព លើចំនួនទឹកប្រាក់ជាប់ពន្ធដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង

(ii) ចំពោះពន្ធកម្ពុជាដទៃទៀត លើប្រាក់ចំណូលដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែមករា ឬថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ដើម្បីជាសក្ខីភាព អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដែលបានទទួលសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ធ្វើជាពីរច្បាប់ នៅរដ្ឋធានីហ្សាការតា ថ្ងៃទី.២៣. ខែ.តុលា. ឆ្នាំ២០១៧ និងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី..២៣.. ខែ.តុលា. ឆ្នាំ២០១៧ ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។ អត្ថបទទាំងអស់មានតម្លៃជាផ្លូវការស្មើគ្នា វៀរលែងតែក្នុងករណីមានការបកស្រាយខុសគ្នា អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ជាឯកសារគោល។

តំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃ
សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

បណ្ឌិត ស្រ្តី មុលីយ៉ានី ឥន្ទ្រាវ៉ាទី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyetujui pada saat penandatanganan Persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak-pajak atas penghasilan bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan satu bagian integral dari Persetujuan ini:

1. Untuk tujuan Pasal 5 ayat 2 subayat (h), dipahami bahwa sebuah bentuk usaha tetap mulai ada pada saat alat pengeboran atau kapal pengeboran berada dalam territorial Negara Pihak.

2. Untuk tujuan Pasal 7, dipahami bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan setiap undang-undang dari Negara Pihak sehubungan dengan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari asuransi, selain dari re-asuransi, dari penanggung bukan penduduk dengan bentuk usaha tetap pada Negara Pihak.

3. Untuk tujuan Pasal 10 ayat 5, dipahami bahwa batas tarif pajak tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat pada kontrak bagi hasil sehubungan dengan minyak dan gas, kontrak karya sektor pertambangan lain, yang ditandatangani oleh Negara Pihak atau perusahaan minyak dan gas milik pemerintah atau lembaganya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal 23 Okt 2017 dan di Phnom Penh pada tanggal 13 Okt 2017 dalam bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris, dimana ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

Dr. AUN PORNMONIROTH

Menteri Senior

Menteri Ekonomi dan Keuangan

REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL

The Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia have agreed at the signing of the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income that the following provisions shall form an integral part of the said Agreement:

1. For the purpose of Article 5, paragraph 2, subparagraph (h), it is understood that a Permanent Establishment exists from the date on which the drilling rig or working ship is present in territory of either Contracting State.
2. For the purpose of Article 7, it is understood that nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to tax imposed on income from insurance, other than re-insurance, of non-resident insurers with a permanent establishment in that Contracting State.
3. For the purpose of Article 10, paragraph 5, it is understood that the tax rate limit shall not affect the provision contained in any production sharing contracts relating to oil and gas, and contract of works for other mining sectors, concluded by a Contracting State or its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of the other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on 23rd Oct 2017 and at Phnom Penh on 13th Oct 2017 in the Indonesian, Khmer, and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Indonesia	For the Royal Government of Cambodia
Dr. SRI MULYANI INDRAWATI	**Dr. AUN PORNMONIROTH**
Minister of Finance	**Senior Minister**
	Minister of Economy and Finance

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0203/CTC/08/2018/52
Number

Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 24 Agustus 2018
Date

REPUBLIK INDONESIA

ពិធីសារ

ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការគេចវេសបន្ទុកពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានឯកភាពថា បញ្ញត្តិខាងក្រោមត្រូវក្លាយជាផ្នែកមួយ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ÷

១. សម្រាប់គោលដៅនៃវាក្យខណ្ឌ (ជ) កថាខណ្ឌ២ ក្នុងមាត្រា៥ គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍កើតមានឡើងចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ដែលគ្រឿងចក្រសម្រាប់ខួងអណ្ដូងប្រេងកាត ឬនាវាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ មានវត្តមាននៅក្នុងដែនដីនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ។

២. សម្រាប់គោលដៅនៃមាត្រា៧ ពុំមានករណីណាមួយនៃមាត្រានេះ ត្រូវមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ទាក់ទិននឹងការកំណត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីការលក់ធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអនិវាសជនដែលមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយ លើកលែងតែការធានារ៉ាប់រងបន្ត។

៣. សម្រាប់គោលដៅនៃកថាខណ្ឌ៥ ក្នុងមាត្រា១០ការកំណត់អត្រាពន្ធនេះ មិនត្រូវមានផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាបែងចែកផលិតផលណាមួយ ដែលទាក់ទិននឹងវិស័យប្រេង និងឧស្ម័ន ព្រមទាំងកិច្ចសន្យានៃការងារនានា ក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែ ដែលបានបញ្ចប់រវាងរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាង ឬក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធ ឬស្ថាប័នណាមួយនៃរដ្ឋនោះ ជាមួយបុគ្គលដែលជានិវាសនជន នៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ខាងទៀត។

ដើម្បីជាសក្ខីភាព អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដែលបានទទួលសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ធ្វើជាពីរច្បាប់នៅរដ្ឋធានីហ្សាការតា ថ្ងៃទី.២៣.ខែ.តុលា..ឆ្នាំ២០១៧ និងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី.១៧. ខែ.តុលា..ឆ្នាំ២០១៧ ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។ អត្ថបទទាំងអស់មានតម្លៃជាផ្លូវការស្មើគ្នា វៀរលែងតែក្នុងករណីមានការបកស្រាយខុសគ្នា អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ជាឯកសារគោល។

តំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃ	តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី	ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បណ្ឌិត ស្រី មូលីយ៉ានី ឥន្ទ្រាវ៉ាទី	បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ	ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
	រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ